

**Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan  
Kemiskinan melalui Pembagian Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate  
Kota Makassar**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos) Jurusan Peradilan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Uin Alauddin Makassar

**Oleh:**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**NURHALIJAH**  
NIM: 30600117014

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhalijah

Nim : 30600117014

Tempat/Tgl Lahir : Biringkaloro/29 Desember 1998

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik

Alamat : Biringkaloro, jln Nurul Jihad

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pembagian Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Maret 2021

Penyusun,

**Nurhalijah**

**NIM. 30600117014**

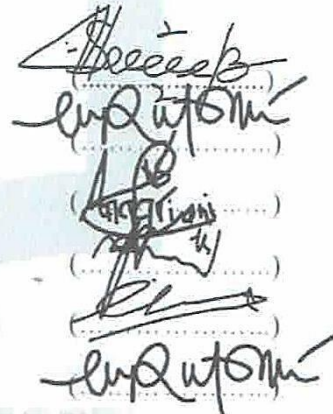
## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Pembagian Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”, disusun oleh Nurhalijah, NIM: 30600117014, Mahasiswa Prodi Ilmu Politik pada Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 16 Juli 2021 M, bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Prodi Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

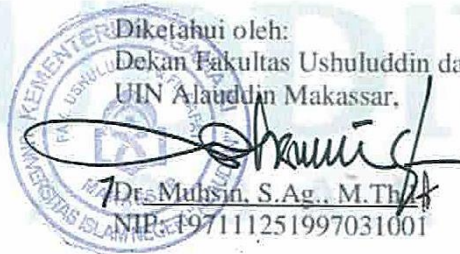
Samata, 25 Juli 2021 M  
6 Zulhijjah 1442 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abdullah, S.Ag, M.Ag.
Sekretaris	: Nur Utaminingsih, S.IP., M.Si.
Munaqisy I	: Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP., M.Si
Munaqisy II	: Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag.
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si
Pembimbing II	: Nur Utaminingsih, S.IP., M.Si.



Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Alauddin Makassar,



Dr. Muhlisin, S.Ag., M.Th.  
NIP. 197111251997031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, Allah Tuhan semesta, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang telah melalui proses yang panjang dan berliku-liku Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis hanturkan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana atas ajarannya sehingga manusia dapat melangkah dari zaman kejahiliaan menuju zaman kepintaran seperti yang kita alami sekarang ini.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan tempat pengembangan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Sejalan dengan ini, penulis memilih judul “*Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Pembagian Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*”. Semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pihak-pihak yang tertarik akan masalah ini.

Teristimewa dan yang paling utama penulis sampaikan banyak terima kasih yang paling tulus kepada Ayahanda **Abbas** dan Ibunda terhebatku **Syamsina** serta s kepada saudara kandung saya **Sinarwati S.H**, **Sri Hamdayani**, dan **Sukran** yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril dan materil terutama doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Tidak ketinggalan untuk kedua Keponakan saya yaitu **Raka dan Alam** yang telah menjadi vitamin semangat saya disaat lelah menyapa. Semoga apa yang telah mereka korbakan selama ini menjadi mahkota kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Selama mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terasa bijaksana bila penulis menhaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan dan bantuan yang diberikan kepada penulis untuk itu patut kiranya diucapkan terima kasih yang sangat tulus dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannnya.
2. Bapak Dr. Muhsin, M.Th.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik serta para Wakil Dekan beserta seluruh staf fakultas.

3. Bapak Syahrir Karim M.Si.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ibu Nur Utaminingsih.,M.Si. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makasar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Utaminingsih, S. IP., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah sangat sabar dan banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, M.Si selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, S. IP, M.Si selaku penguji I dan Bapak Dr. H. Aan Parhani, Lc., M. Ag selaku penguji II saat Seminar Proposal, Ujian Kualifikasi Hasil dan Munaqasyah yang telah memberikan saya banyak masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik.
8. Bapak/Ibu Instansi Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga kepada Masyarakat Kecamatan Tamalate yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagai lokasi penelitian.

9. Bapak Burhanuddin, Bapak Ilham, Ibu Sri Warda S.Km, Bapak Kurniawan, Ibu Dg. Ngitte, Ibu Ima, dan Ibu Nur Aeni yang telah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan bersedia menjadi informan.
10. Teman-teman seangkatan 2017 sejurusan Ilmu Politik terkhusus teman-teman kelas IPO 1, sahabat-sahabatku Pratiwi Ferdianti, Nur Aisyah Hardianti, Habiba Makkawaru, Nirwana Sakir, Radhiatul Muliana. Z, Heri Fadli, Itta Huljannah, Andi Nada Azzahra, dan Indri Devianti yang selalu membantu dan yang selalu kurepotkan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Kepada Ji Chang Wook, Sehun, Betrand, dan Yuki Kato yang selalu menghibur di saat saya lelah berfikir dalam penyusunan skripsi ini. dan juga kepada teman-teman KKN-DK Angkatan 64 Kecamatan Pallangga, Kelurahan Tetabatu Kabupaten Gowa
11. Kepada kedua orang tua penulis, terkhusus Ibu dan Bapak saya yang telah mendukung dan berjuang mencari nafkah demi membiayai kuliahku dan kebutuhan kuliah saya serta mendoakan sepenuhnya setiap aktivitas penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

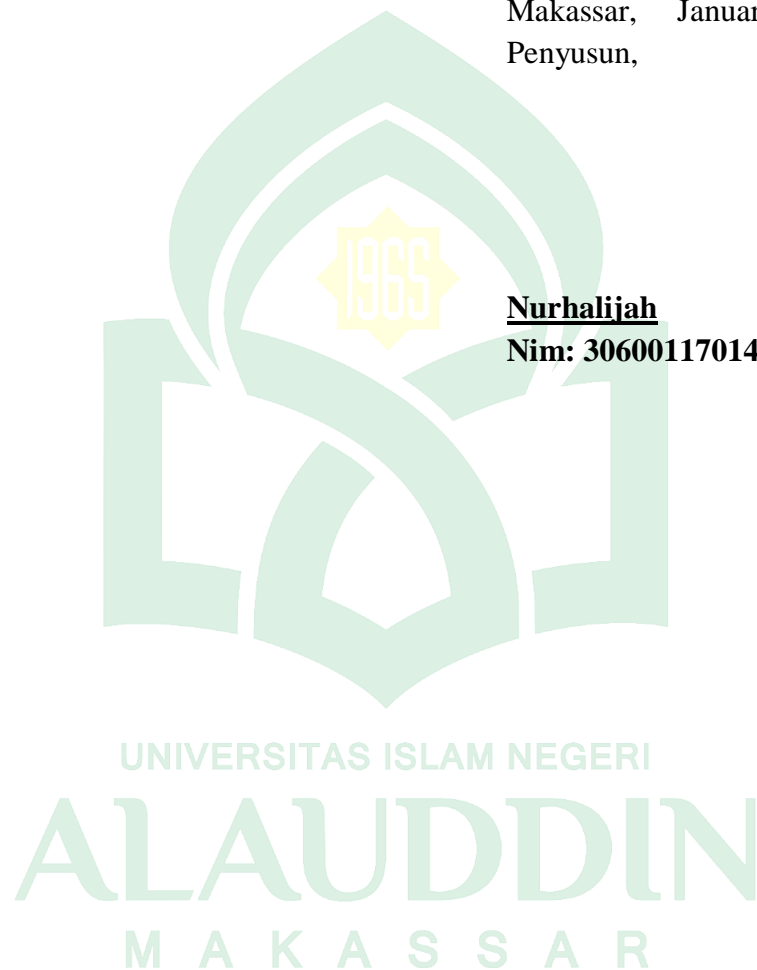
Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang diiringi dengan kesabaran dan doa yang tulus senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis sangat menyadari akan keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh

karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, Januari 2021  
Penyusun,

**Nurhalijah**  
**Nim: 30600117014**





## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PEENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xii
ABSTRAK .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1-9
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	10-21
A. Teori Kebijakn Publik .....	10
B. Teori Kemiskinan.....	15
C. Teori Distribusi dan Alokasi .....	18
D. Kerangka Konseptual .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	22-26

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	22
B. Teknik Pengumpulan Data .....	23
C. Sumber Data .....	24
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	27-66
A. Gambaran Umum Kota Makassar .....	27
B. Gambaran Umum Kecamatan Tamalate .....	29
C. Gambaran Umum Program Kartu Sakti .....	35
D. Implementasi Kebijakan Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar .....	37
E. Dampak Kartu Sakti dalam Kemiskinan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar .....	57
BAB V PENUTUP .....	67-69
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70-71
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	72-75

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	30
Tabel 4.2.....	30
Tabel 4.3.....	31
Tabel 4.4.....	32
Tabel 4.5.....	52
Tabel 4.6.....	52
Tabel 4.7.....	53
Tabel 4.8.....	54



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Ša'	Š	S (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	š	S(dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	D(dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	T(dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Z(dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-

م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	◌ْ	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

## B. Vokal

Dalam bahasa Arab vokal seperti bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal(monotong) dan vokal rangkap(diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Dalam bahasa Arab vokal tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌ْ	Fathah	A	A		
◌ِ	Kasrah	I	I	مُنِرَ	Munira
◌ُ	Dhammah	U	U		

### 2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa Arab vokal rangkap dilambangkan berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌ِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i	كَيْفَ	Kaifa
◌ِو	Ksrah	I	I	هَوْلَ	Haula

### C. Maddah(vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah +Alif,ditulis ā	Contoh	سَال	ditulis Sāla
Fathah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh	يَسْعَى	diutlis Yas'ā
Kasrah + Yā' mati ditulis i~	Contoh	مَجِيد	ditulis Majī
Dhammah + Wau mati ditulis ū	Contoh	يَقُول	ditulis Yaqū

### D. Ta'Marbuthah

1. Bila dimatikan, maka ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang telah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. Contoh:

هَبْهَ                      dibaca hibah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

Contoh:            نَعِمَتُ اللّٰه    dibaca ni'matullāh

### E. Sayddah(Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap, contoh:

عَدَّة                      Ditulis 'iddah

### F. Kata sandang Alif+Lām

Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah ditulis Al, contohnya:

الرَّجُل                      Ditulis Al-Rajulu

### G. Hamzah

Hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof, sedangkan hamzah yang terletak diawal kalimat ditulis alif. Contoh: شَيْئٌ ditulis Syai'un

#### H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digubakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui(EYD). Contohnya: Penulisan kata pada susunan kalimat bisa ditulis berdasarkan bunyi atau pengucapan atau penulisannya. Contoh: اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah.



## ABSTRAK

**Nama : Nurhalijah**

**Nim : 30600117014**

**Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pembagian Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

---

Skripsi ini dibuat dari masalah yang penulis temui di lapangan mengenai Analisis kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pembagian kartu sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Penelitian ini memiliki dua fokus masalah penelitian. Pertama, Implementasi kebijakan kartu sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Kedua, Dampak Kartu Sakti terhadap kemiskinan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kartu sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan untuk mengetahui dampak Kartu Sakti terhadap kemiskinan.

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang dipakai dalam meneliti dari kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa metode wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah data *primer* dan data *sekunder*. Adapun teknik analisa data yang dilakukan peneliti dapat diuraikan, yaitu: reduksi data dan penyampaian data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori kebijakan publik, kemiskinan dan distribusi dan alokasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Pembagian Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dalam mengurangi angka kemiskinan pemerintah membuat kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Dengan adanya kartu sakti tersebut memberi dampak kepada masyarakat kota Makassar khususnya masyarakat kecamatan Tamalate dengan uraian: Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu yang diterbitkan pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu. Yang dimana Kartu Keluarga Sejahtera ini memiliki 2 program bantuan yaitu Program sembako dan program keluarga harapan. Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini juga merupakan kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda siswa miskin, dalam pembagian Kartu Indonesia Pintar ini sangat bermanfaat bagi siswa yang membutuhkan karna ini sangat membantu dalam membeli perlengkapan sekolah. Sedangkan Program Kartu Indonesia sehat merupakan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kartu Indonesia Sehat ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan gratis.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. *Latar Belakang***

Kemiskinan adalah salah satu persoalan pemerintah yang sangat penting karena yang dimana kemiskinan nanti akan mendatangkan masalah yang lainnya. Misalnya saja kriminalitas, wabah penyakit dan penjajahan bangsa asing. Perekonomian yang tidak merata yaitu pendidikan yang rendah dan kesempatan kerja yang sempit merupakan penyebab kemiskinan yang tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Kemiskinan merupakan permasalahan utama untuk negara berkembang khususnya di Indonesia yang dimana sejak tahun 1970-an hingga saat ini upaya yang dilakukan pemerintah masih belum mampu menuntaskan masalah tersebut. Kebijakan demi kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah nyatanya belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan Indonesia yang bertambah setiap tahunnya. Pada periode kepemimpinan Joko Widodo kebijakan yang diambil guna mengatasi masalah kemiskinan adalah mengeluarkan kartu sakti seperti KIP, KIS, dan KKS yang disalurkan keseluruh wilayah.

---

<sup>1</sup> Yeni Salma Barlinti, "Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Hukum*, 4, no, 3 (2007): h. 159.

Untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Terdapat beberapa upaya dalam mengurangi jumlah penduduk miskin yang didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada menyediakan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, dan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.<sup>2</sup> Hal demikian juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna menanggulangi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat di Indonesia. Dimana pada era pemerintahan Joko Widodo beliau mengeluarkan kartu sakti sebagai langkah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu diantaranya kartu Indonesia pintar dengan jumlah anggaran mencapai 1,1 triliun dan disalurkan kepada siswa sebesar 1,60 juta, dari jumlah anggaran kartu keluarga sejahtera sebesar 1,6 triliun dan disalurkan sebesar 1,2 juta, sedangkan kartu Indonesia sehat dengan jumlah anggaran 21,1 triliun dan disalurkan sebesar 92 juta jiwa.<sup>3</sup>

Kebijakan pemerintah yang mengeluarkan kartu bantuan dengan nama julukan kartu sakti yang dimana ini akan di salurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam program kartu sakti tersebut sudah disebar di seluruh wilayah Nusantara. Terkait dalam kebijakan pemerintah mengenai kartu sakti ini lebih banyak menampilkan kontroversi di tengah masyarakat dikarenakan kebijakan ini akan dinilai gagal jika sampai di tangan orang yang salah.

---

<sup>2</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Bandung: Prenamedia Group, 2011), h. 821.

<sup>3</sup> TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Sekretariat Wakil Presiden RI, (diakses pada tanggal 09 Desember 2020 [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id)).

Hal inilah yang terjadi di kecamatan Tamalate kota Makassar yang dimana beberapa masyarakat kurang mampu tidak mendapat kartu sakti sebagaimana tujuan dari penyaluran kartu itu sendiri. Hal ini dianggap tidak sesuai karena terdapat masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, akan tetapi tidak menerima kartu tersebut, akibat dari petugas yang tidak mengakomodasi ke seluruh masyarakat terkait pendataan sistem membuat masyarakat merasa kecewa terhadap program yang diluncurkan oleh pemerintah pusatnya. Yang mengherankan yang menerima kartu sakti tersebut malahan masyarakat yang mampu secara ekonomis dimana masih dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam proses pemerataan atau kurangnya sifat amanah dari petugas yang diberikan amanah untuk mendata sehingga hal ini di ingatkan dalam Q.S an-Nisa/4: 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, dan Maha Melihat (QS An-nisa (4) ayat 58)”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan* ( Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al Qur'an) hlm. 87

Surah tersebut dengan jelas menyebutkan bahwasanya keadilan harus ditegakkan. Dimana amanah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat seharusnya di realisasikan sebagaimana mestinya. Namun pada kenyataannya, masyarakat tetap saja tidak menerima hak yang semestinya ia dapatkan.

Pendistribusian program kartu sakti ini dapat dikatakan tidak tepat sasaran, dimana dalam proses pendataan tersebut seharusnya dilakukan sesuai prosedur yang ada, akan tetapi dilakukan secara sembarangan. Sehingga terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan kartu tersebut dan akan sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan, namun dalam pendistribusian ini menjadi tidak tepat sasaran. Diharapkan pemerintah bisa sebijak mungkin dalam mendata masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan tepat sasaran. Seharusnya dalam berlangsungnya pendataan dilakukannya sosialisasi supaya masyarakat bisa mengerti terkait bantuan pada program kartu sakti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian terkait ***“Analisis kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pembagian kartu sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”***.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan kartu sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

2. Bagaimana dampak Kartu Sakti terhadap kemiskinan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan kartu sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dampak Kartu Sakti terhadap kemiskinan.

### **D. Manfaat dan Kegunaan**

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian yaitu:

#### **1. Teoritis**

Secara teoritis penulis berharap semoga karya ini bisa dijadikan sebagai data referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang terutama mengenai kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan terhadap pelaksanaan pemberian kartu sakti atau kartu bantuan dan juga sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia penelitian dalam bidang politik dan sosial.

#### **2. Praktis**

Secara praktis penelitian ini merupakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana (strata satu) di bidang Ilmu Politik.

### ***E. Kajian penelitian***

Dari hasil penelitian baik skripsi, tesis maupun jurnal terdapat beberapa karya terdahulu yang relevan. Pada jurnal Yeni Salma Barlinti pada tahun 2007 Dosen Fakultas Hukum, berjudul “Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan” dengan menggunakan metode kualitatif dimana dalam penelitian tersebut membahas mengenai kemiskinan yang di tanggulasi tidak hanya diselsaikan oleh satu satu pihak dan bidang ilmu saja. Antara bidang pendidikan, hukum, sosial, agama dan ekonomi sangat dibutuhkan dalam upaya menaanggulasi masalah kemiskinan yang diman hal tersebut bukanlah pekerjaan yang dapat dikatakan mudah. Meski dalam hal ini pemerintahh bekwajiban untuk melindungi warganya guna mendapatkan kesejahteraan sosial, namun dukungan tetap diperlukan dari masyarakat itu sendiri, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan lebih merajuk pada pemberian kartu sakti dalam penanggulangan kemiskinan yang dimana hal ini penerapan kebijakan pemerintah di kecamatan Tamalate dimana sebagian masyarakat telah menerima kartu sakti, namun yang mendapatkan kartu tersebut ialah orang-orang yang dapat dikatakan mampu dalam perekonomian.

Jurnal, Marliya Mahasiswa Program Studi Magizter Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako dengan judul “Imlementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Palu” membahas tentang sebuah program yang ada di kota Palu guna menanggulasi kemiskinan yang memiliki tujuan untuk

melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang menerima bantuan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam program tersebut ialah bantuan raskin untuk masyarakat miskin di daerah tersebut dimana sikap atau disposisi dari pelaksanaan kebijakan yang ada tidak secara transparan dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan pada penelitian saya ini lebih berfokus pada proses penyaluran kartu sakti dalam hal ini mengenai pemerintah dalam menyalurkan kartu sakti kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Jurnal, *Aidus Mahioborang yang berjudul “Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan (suatu studi di Kabupaten Sangihe)”* pada penelitian ini, peneliti membahas tentang cara atau siasat pemerintah dalam menanggungi kemiskinan yang secara factual tidak dapat mengangkat taraf hidup dan tingkat kehidupan bagi masyarakat yang bermukim di pesisir. Pemerintah pusat telah merancang sebuah program untuk masyarakat nelayan yang bersifat sementara dimana hal ini secara berkesinambungan belum terealisasi yang secara tidak langsung hanya menjalankan program sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diidentikkan dengan kemiskinan dikarenakan tidak terpenuhinya hak dasar seperti kesehatan, pangan, pekerjaan, infrastruktur maupun pendidikan. Masalah yang dialami masyarakat nelayan ini berkaitan dengan pola hidup tradisonal dimana dalam penggunaan teknologi yang sederhana dengan sistem peralatan perahu dayung.

Skripsi, *Fitriyani Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, "Kebijakan pemerintah tentang program kartu sakti dalam perspektif siyasah"* dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam program kartu sakti dimana dalam teori keadilan sosial dalam islam tidak terdapat kesimbungan. Dalam teori tersebut hakikatnya untuk mencapai kesejahteraan hal ini karena beberapa faktor diantaranya tidak efektif, tidak sesuai dengan konsep kesejahteraan sosial serta tidak tepat sasaran.

Jurnal, *Dani Kurniawan yang berjudul "kemiskinan Indonesia dan solusinya"* dalam penelitian inipun penulis membahas mengenai kemiskinan yang diawali dari factor ketidakadilan sosial dan ketimpangan yang menjadi sebab-musebab dari falsafah Indonesia dan keluarnya bangsa Indonesia. Pemberdayaan perekonomian rakyat terbukti menjadikan sebuah upaya yang mutlak yang harus di lakukan dengan tahan banting terhadap krisis. Mengingat sulitnya mencapai relativisme perumbuhan ekonomi tinggi yang diharapkan dari sebuah investasi besar maka pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memberdayakan potensi yang tersembunyi untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

Secara garis besar, dari beberapa penelitian-penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dimana implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di beberapa daerah serta solusi yang di sediakan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan saat ini, peneliti



mencoba untuk mencari tahu mengenai program-program kebijakan yang disediakan oleh pihak-pihak untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di Kota Makassar dengan berfokus pada implementasi kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Pembagian Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK

#### A. *Kebijakan Public*

Kebijakan adalah suatu determinasi yang diambil oleh sekelompok atau seseorang yang bergalut dirana politik dalam upaya untuk memilih arah dengan upaya yang dipakai untuk memperoleh tujuan tersebut. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ialah, seseorang yang merealisasikan kebijakan-kebijakan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan kebijakan dalam proses tak cuma melibatkan perilaku badan-badan pemerintahan/administratif yang melaksanakan program untuk bertanggung jawab yang akan menimbulkan kepatuhan kepada diri kelompok sasaran, melainkan pula melekat pada jaaringan, ekonomi, sosial, dan kekuatan-kekuatan politik, yang dimana secara tidak langsung maupun secara langsung yang dapat mempengaruhi pihak yang terlibat untuk para perilaku (stakeholders). Ketidaksempurnaan ataupun kesalahan dalam suatu kebijakan lazimnya akan dapat dievaluasi selepas dalam kebijakan yang akan dilaksanakan, dan begitu pula dengan kesuksesan dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat dianalisis atas dampak yang di timbulkan serupa dengan hasil pelaksanaan kebijakan tersebut.

---

<sup>5</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 20.

Keban pun mengemukakan bahwa dalam kebijakan public merupakan sebuah struktur kerja, dan juga dapat dilihat layaknya sebuah kreasi, sistem, dan konsep filosofis. Dalam sebuah konsep filosofi yang dimana, sebuah prinsip atau keadaan yang dikendaki; kebijakan dilihat sebagai sebuah keputusan atau jalan keluar sebagai sebuah kreasi,; dan sebagai sebuah sistem adalah kebijakan, dalam kebijakan yang diamati sebagai pola yang dimana, dalam pola organisasi tersebut dapat memahami apa yang diharapkan terhadapnya, dalam program serta metode yang akan dilakukan demi berhasilnya metode yang ada, dan juga sebagai struktur kerja, kebijakan yaitu bernegosiasi guna menganalisis isu-isu atau tawar-menawar dan serta dalam pola praktiknya.<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, sebenarnya dalam kebijakan tersebut dapat mempertimbangkan objek pada kebijakan itu sendiri, sehingga dalam pemerintah pun yang melaksanakan tugas dalam menerapkan kebijakan tersebut bisa menganalisis serta mendapatkan jalan keluar, jika timbul masalah dalam penerapan atau implementasi dalam sebuah kebijakan-kebijakan tersebut. Serta dalam kebijakan public tersebut sering kali mempunyai arah spesifik, yang bisa diaplikasikan dan dilakukan untuk menyelesaikan dan juga, menjadi jalan keluar dalam sebuah masalah public.

---

<sup>6</sup>Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, (Yogyakarta: Gaya Media Yogyakarta, 2004), h. 55.

Davis dan Bridgeman mengemukakan bahwasanya dalam kebijakan public tersebut mempunyai 3 (tiga) sudut pandang yang paling berkaitan. yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal, dan sebagai hipotesis.

#### 1. Kebijakan Publik sebagai tujuan

Dalam kebijakan tanpa tujuan tak mempunyai makna bahkan tidak mustahil akan memicu perkara baru, misalkan yaitu kebijakan yang tak mempunyai arah yang tepat, maka dalam program tersebut bakal diimplementasikan secara berbeda-beda, rencana pendapatan menjadi redup, para analisis pun megemukakan bahwa pada akhirnya pemerintah pun sudah kehialangan arah, dan dimana, pada kebijakan yang bagus akan merumuskan secara eksplit dan akan menghindari jebakan. Dan melalui interaksi serta konsultasi, perumusan dalam tingkatan kebijakan memfokuskan kestabilan hingga kebijakan yang baru tak berposisi antara program dan agenda pemerintahan yang lagi di laksanakan. Dalam kebijakan public yakni dalam suatu rangkaian pilihan yang meliputi evaluasi, analisis, reconsiderasi (pertimbangan kembali), dan implementasi. Serta tujuan kebijakan yang sudah tetap umumnya sedikit meleset yang dimana, terdapat dampak yang terjadi diluar dugaan. Sebuah skema pemberian lisensi dalam kegiatan tertentu, seperti pemberian kredit mikro bagi rakyat miskin ataupun, pembentukan skema asuransi sosial. lazimnya mengintimidasi para elite tertentu maupun sekelompok orang yang

kemungkinan akan terganggu oleh kebijakan baru. Yang dimana, dapat dipandang bahwa akan mengganggu kepentingan mereka.

## 2. Kebijakan public sebagai pilihan tindakan yang legal

Tindakan dalam kebijakan bersifat otoritatif ataupun legal, dimana dikerjakan oleh sebuah lembaga yang mempunyai legitimasi dalam system pemerintahan. Keputusan tersebut menyangkut pada pegawai negeri untuk berbuat ataupun memfokuskan opsi dari perbuatan atau aktivitas ibarat mempersiapkan peraturan pemerintah atau rancangan undang-undang untuk di pertimbangkan bagi parlemen ataupun membagi-bagikan anggaran untuk menerapkan sebuah program.

## 3. Kebijakan public sebagai hipotesis

Kebijakan sebagai hipotesis membutuhkan sosial dan perincian ekonomi kepada para pembuat kebijakan dan penasihat, melihat dari kebijakan tersebut sebagai hipotesis pun memperlihatkan temuan-temuan hasil evaluasi serta implementasi dan pentingnya. Pengerjaan kebijakan yang bagus diawali dengan keahlian dalam menguasai pelajaran dari pengalaman kebijakan serta kemampuan menerapkan pelajaran itu dalam langkah perumusan kebijakan selanjutnya.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwasanya dari kebijakan public sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan legal, dan sebagai hipotesis yang dimana dari ke tiga diatas mempunyai ikatan yang amat kuat serta saling mempengaruhi satu sama lain.

---

<sup>7</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 7-8

Artinya, dalam sebuah proses perumusan kebijakn yang dibahas dari bagian ke 3 yaitu, sebuah kebijakan public hakikatnya membentuk opsi-opsi aksi yang ilegal serta dilakukan berlandaskan hipotesis yang logis untuk memperoleh target yang ditetapkan.

Merielee S Gridle, menyatakan, implementasi sebuah tindakan yang administrative yang bisa di teliti pada tahap program tertentu. Dan menurut Horn dan Van Meter, mengemukakan implementasi kebijakan yakni perbuatan yang dilaksanan para swasta dan juga para pemerintah baik secara kelompok maupun individu yang direncanakan demi memperoleh tujuan. Sedangkan Grindle, berpendapat bahwasanya proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan program kegiatan telah tersusun dan dana pun telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.<sup>8</sup>

Proses dari implementasi kebijakan tersebut sebenarnya tak cuma melibatkan integritas pada badan administratif yang bertanggung jawab dalam melakukan program serta melahirkan kepatuhan kepada kelompok sasaran, melainkan melibatkan jaringan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang tidak langsung ataupun langsung dan yang bisa mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan dari kebijakan public dapat direalisasikan sebaagai hasil kegiatan pemerintah.

---

<sup>8</sup>Imronah "Implementasi kebijakan perspektif, model dan kriteria pengukurnya", *Jurnal*. Hal 66.

## **B. Kemiskinan**

Kemiskinan adalah problematika dari berbagai dimensi dan sector yang dipengaruhi oleh beberapa factor yang satu sama lainnya saling berkaitan, seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, dan kondisi lingkungan yang dimana sampai saat ini jumlah masyarakat miskin Indonesia masih besar.

Terdapat dua jenis kemiskinan yaitu: kemiskinan yang bersifat kronis merupakan jenis kemiskinan yang sangat terbatas dari infrastruktur transportasi yang menunjukkan bahwa penduduk miskin yang tinggal di daerah terpencil, sering mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan, serta tidak memiliki banyak peluang untuk memperoleh pendidikan, jenis ini biasanya akan menghasilkan keturunan yang miskin pula sehingga jenis ini selalu dihubungkan dengan kemiskinan antar generasi. Sementara yang kedua, jenis kemiskinan yang disebabkan karena suatu kejadian atau perkara yang mempengaruhi kehidupan orang yang bersangkutan dinamakan kemiskinan sementara (Transient Poverty). Ketika kondisinya telah membaik, maka mereka akan dapat hidup normal dan lebih baik lagi. Kemiskinan perkotaan umumnya memiliki ciri atau karakteristik kemiskinan transien. Penjelasan tersebut merupakan pendapat dari Sonny Harry.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nunung Nurwati “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan”, *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, 10, no. 1 (2008): h. 8.

Mudjarat Kuncoro mengartikan kemiskinan ketidak sanggupannya dalam memenuhi standar hidup minimum dimana pada pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Dari konsumsi tersebut garis kemiskinan dibagi menjadi dua unsur yaitu: pertama, pengeluaran yang dibutuhkan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, kedua, jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi yang menggambarkan biaya keikutsertaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian menurut Bachtiar Chamsyah menjelaskan bahwa, kemiskinan merupakan keadaan tertutup, yang tertutup dari segala bentuk kelangkaan kebutuhan diri baik itu bersifat fisik ataupun non fisik. Dan menurut Suparlan, kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan benda-benda berharga dan harta benda yang dimiliki oleh individual atau sekelompok orang yang hidup didalam lingkungan yang serba kekurangan uang, hukum, kekuatan sosial, pengetahuan ataupun akses pelayanan umum dan lapangan kerja. <sup>10</sup>

Dari beberapa penjelasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwasanya di satu sisi, kemiskinan itu memang takdir yang harus diterima oleh manusia namun pada sisi lain manusia diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengubah keadaan tersebut sehingga tidak lagi menjadi miskin. Sehingga hal ini dijelaskan dalam Q.S al-Ra'ad/13 :11 berbunyi:

---

<sup>10</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia*, (Erlangga, 2016), h. 281.



لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ١١

Terjemahnya:

“Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia”.<sup>11</sup>

Surah tersebut menjelaskan bahwa Allah swt menugaskan kepada beberapa malaikat untuk selalu mengikuti manusia secara bergiliran dan menugaskannya untuk mencatat amal perbuatan manusia. Dalam Islam, kemiskinan diartikan sebagai keadaan kekurangan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak jarang menjerumuskan pada kemiskinan.

Yang dimana Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang sebelum orang tersebut yang mengubah diri mereka sendiri. Dalam hal ini, masyarakat haruslah mengubah pola pikir mengenai kemiskinan agar lebih mensyukuri apa yang telah dimiliki. Karena Allah tidak menjadikan seseorang itu miskin, yang ada hanyalah orang yang merasa cukup dan tidak merasa cukup atas apa yang telah dimilikinya.

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan* ( Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al Qur'an) hlm.250

### ***C. Distribusi dan Alokasi***

Distribusi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemberian barang kebutuhan sehari-hari pada masa sulit atau darurat dari pemerintah untuk rakyat.<sup>12</sup> Alma berpendapat bahwa distribusi merupakan sebuah lembaga yang saling terkait antara satu dan lainnya guna melakukan sebuah kegiatan pemberian barang maupun jasa untuk di pergunakan oleh yang membutuhkan dalam hal ini ialah konsumen. Sedangkan Daniel mengatakan distribusi merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan memperlancar sebuah pemberian barang dan jasa dari pihak pemberi dan penerima, sehingga distribusi dapat dikatakan sebagai sebuah proses yang menghubungkan produsen dan konsumen.

Permasalahn utama dalam perekonomian Islam ialah distribusi. Dimana hal ini berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan social dalam hal ini ialah masyarakat. Kesejahteraan dalam hal ini diukur berdasarkan prinsip dari pemenuhan kebutuhan di setiap individu ditengah masyarakat yang tidak berdasar pada permintaan maupun penawaran, cadangan devisa, indeks harga-harga di pasar non-rill ataupun nilai mata uang, pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dialami dalam sistem perekonomian kapitalis. Dalam hal ini dipengaruhi oleh sudut pandang para pakar ekonomi kapitalisme mengenai produksi yang menjadi masalah utama dalam perekonomian.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (diakses pada tanggal 24 september 2020), pukul 23:00

<sup>13</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahaman, *sistemEkonomi Islam*, (Jakarta: Hisbuttahrir Indonesia, 2004), h. 16.s

Secara garis besar, distribusi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pemasaran guna mempermudah atau memperlancar penyaluran barang ataupun jasa dari pihak satu ke pihak yang membutuhkan. Sehingga penggunaannya pun sesuai dengan apa yang diharapkan dalam hal ini berupa jenis, harga, tempat maupun saat yang dibutuhkan.

Alokasi sendiri merupakan sebuah penyediaan barang public dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dimana ini akan membawa hasil dari pertimbangan ataupun pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Umumnya negara yang masih berkembang memiliki derajat sentralisasi keuangan tinggi dalam artian pemerintah pusat akan membiayai kegiatan penyediaan dan pengambilan barang public yang berasal dari pajak. Ini disebabkan karena kemampuan administrasi pemerintah daerah yang lemah. Sehingga terdapat perbedaan yang cukup tinggi dalam situasi dan kondisi antar daerah, kabupaten ataupun provinsi guna meminimalisi gerakan separatis serta diperlukan yang namanya perencanaan nasional secara menyeluruh. Beberapa diantara negara Asia, Indonesia memiliki gradasi sentralisasi yang tinggi pada tahun 1970an dengan 90,1% subsidi pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta 83,3% pemerintah negara berada di tangan pemerintah pusat sebagai tandanya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, ( Yogyakarta: C.V Andi Ofset, 2002), h. 37.

Distribusi dan Alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai values dalam masyarakat. Para sarjana yang menekankan distribusi dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain adalah membagikan atau mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Penekanannya disini adalah bahwa pembagian sering terjadi secara tidak merata dan karenanya menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.

#### ***D. Kerangka Konseptual***



kebijakan public acap kali memiliki tujuan-tujuan tertentu, yang dapat dilakukan dan diaplikasikan untuk memecahkan serta sebagai jalan keluar dari sebuah masalah public. Seperti halnya pada kasus kemiskinan yang tidak hentinya ingin diperbaiki oleh pemerintah, sala satu dari kebijakan pemerintah untuk

mengurangi kemiskinan di ibu kota adalah dengan mengeluarkan kartu sakti untuk masyarakat miskin.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang dipakai dalam meneliti dari kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu induktif dimana pengambilan kesimpulan umum yang diuraikan menjadi fakta-fakta berdasarkan hasil dari observasi khusus.

Penyusunan data hanya memilih data yang penting dan diperlukan saja untuk memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan. Memaparkan data yang obyektif tentang suasana sebetulnya tanpa konsekuensi ataupun tatapan personal. Data yang dikumpulkan dengan wawancara yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan warga Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu di Kecamatan Tamalate Kota Makassar karena penulis meneliti terhadap Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pembagian Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan berbagai sumber, misalnya itu Wawancara atau Tanya jawab, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi lainnya yang tidak bertumpu pada satu sumber data yang ada.<sup>15</sup>

### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu perbincangan dengan tujuan tertentu untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada maka diperlukanlah alat untuk merekam dari perbincangan dengan informan serta dapat menggunakan alat tulis untuk dapat menulis bagian-bagian penting dari hasil perbincangan juga dalam pedoman wawancara yang didapat hanya berupa inti point dari permasalahan yang akan dipertanyakan.<sup>16</sup> Wawancara ditujukan untuk mendapatkan informasi atau data dengan tujuan penelitian dalam bentuk Tanya jawab dan bertatap muka antara informan dan pewawancara, dan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti pun akan mewawancarai salah satu dari pihak Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Kementerian Sosial dan Masyarakat kecamatan Tamalate.

---

<sup>15</sup> Jhon W Creswell, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2012), h 261.

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung, : Alfabeta, 2009), h. 140.

## 2. Observasi

Metode observasi ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melewati pemantauan beserta pengindraan. Panca indra merupakan alat utama observasi dalam mendukung data-data lainnya.<sup>17</sup> Peneliti hanya melakukan observasi selama tiga hari dengan memantau sekaligus mengambil dokumentasi.

## 3. Informasi

Dalam penyusunan penelitian ini ada beberapa menjadi acuan seperti buku dan jurnal.

### C. Sumber Data

Sumber data dapat berupa bacaan, gambar, nilai atau nomor, cetakan dan lain sebagainya, data dikumpulkan berdasarkan petunjuk dan objek penelitian yang jelas dan bersumber dari informan yang sudah diidentifikasi, dihubungi serta telah mendapatkan izin atas keinginan untuk menyampaikan sebuah data atau keterangan mengenai apa yang dibutuhkan.<sup>18</sup>

Penelitian ini memanfaatkan beberapa sumber data yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), h. 118.

<sup>18</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulanya*, (Jakarta: PT. Granmedia Widiasaeana Indonesia, 2010), h. 108.



### 1. Data primer

Data primer merupakan data dan informasi yang diterima mulai subjek/objek penelitian. Data tersebut berupa jawaban dari hasil wawancara dari golongan yang dirasa berkompeten beserta relevan yang menggunakan subjek/objek penelitian penulis.

### 2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang penulis peroleh secara tepat yaitu menggunakan beberapa referensi sumber-sumber kepustakaan dan arsip resmi lainnya.

### ***D . Teknik Analisa Data***

Analisa data merupakan teknik pengelompokan, bagian, pembentukan, beserta definisi, sehingga data yang tergabung bisa dikasih manfaat untuk merespon masalah penelitian yang sudah dirumuskan ataupun untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif bersikap induktif, dengan berdasarkan data yang diperoleh, agar diperoleh gambaran mengenai Analisis kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pembagian kartu sakti di kecamatan tamalate kota Makassar.

Analisa data memakai tehnik-tehnik penjabaran data yang berkarakter kualitatif, aktivitas menganalisis semua pernyataan hasil wawancara yang didapat

---

<sup>19</sup> Syamsuddin A.R, & Damaianti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 72.

dari informan yang dipercaya sesuai dengan masalah penelitian. Secara jelas tahapan yang dilakukan peneliti dapat diuraikan yaitu:

- 1) Reduksi data ialah dilaksanakan atas upaya membagikan isyarat mengenai bukti-bukti yang sinkron oleh keperluan bukti penelitian untuk merespon dari pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah dari penelitian.
- 2) Penyampaian data ialah data yang sudah reduksi kemudian dengan menyusun lalu disajikan dalam wujud tulisan yang mempunyai makna dari keahlian untuk merespon masalah-masalah penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Profil Kota Makassar*

Kota Makassar adalah ibu kota di provinsi Sulawesi selatan yang dimana kota tersebut kota terbesar keempat di Indonesia, kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km dengan jumlah penduduk 1,526,677 jiwa yang dimana kota Makassar ini mayoritas penduduknya beragama islam. Kota Makassar pun berperan sebagai pusat perdagangan barang dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintah, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

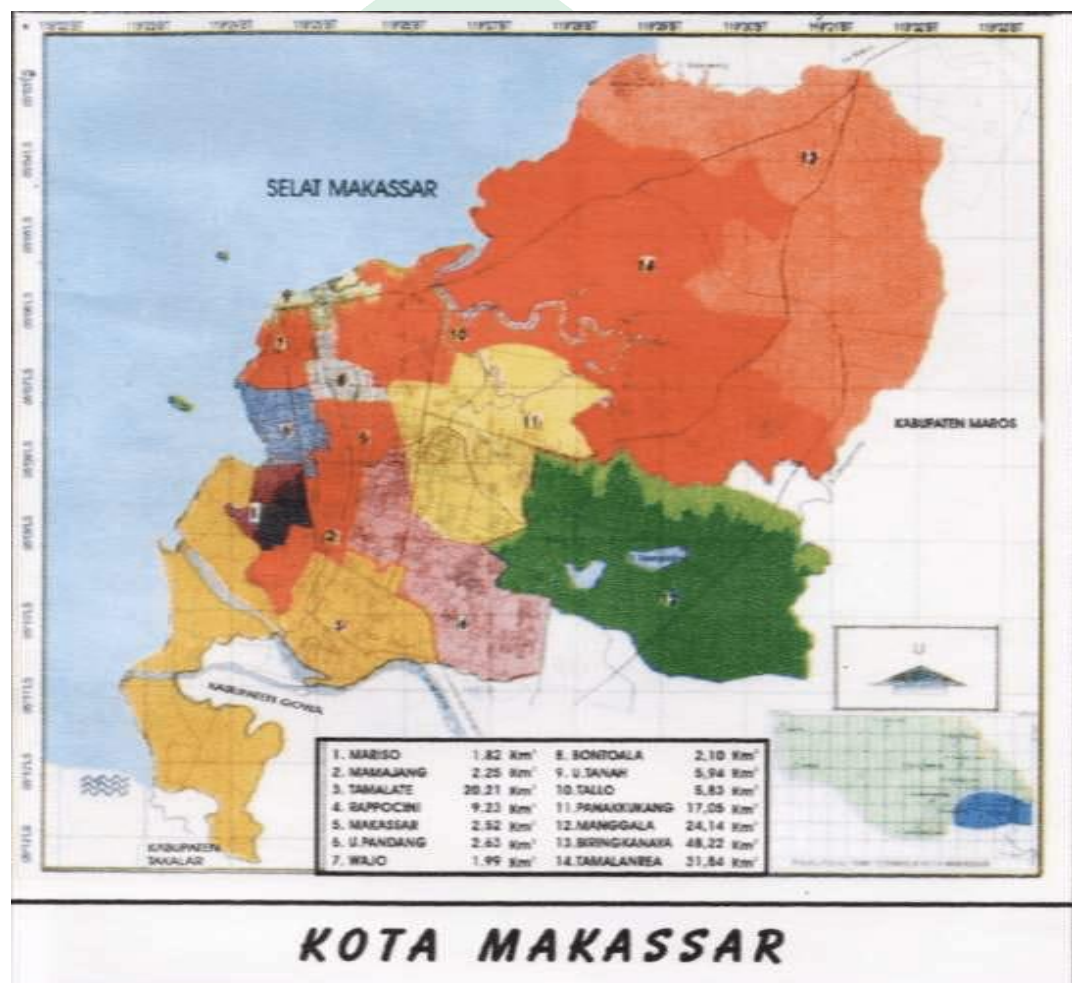
Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administrative sebagai berikut

- Batas utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Batas Selatan : Kabupaten Gowa
- Batas Timur : Kabupaten Maros
- Batas Barat : Selat Makassar

Secara administratif kota Makassar terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan

Tallo. Dibagian selatan terbagi atas Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Tamalate. Dibagian timur terbagi atas Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala, Bagian barat yaitu Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Mamajang.<sup>20</sup>

**Gambar 4.1: Pete wilayah kota Makassar**



Sumber: <https://makassarkota.go.id>

<sup>20</sup> <https://makassarkota.go.id/geografis/> (Di akses pada tanggal 10 April 2021)

## **B. *Profil Kecamatan Tamalate***

### **1. Letak Geografis dan Batas Wilayah**

Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 14 kecamatan di kota Makassar yang berbatasan disebelah utara dengan Kecamatan Mamajang, disebelah timur Kabupaten Gowa, disebelah selatan Kabupaten Takalar dan sebelah barat dengan selat Makassar. Sebanyak 3 kelurahan dikecamatan Tamalate merupakan daerah pantai dan 8 daerah lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi dibawah 500 meter dan permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan bervariasi antara 1-2km (Maccini Sombala dan Balang Baru), antara 3-4km (Jongaya, Bontoduri, dan Parang Tambung), kelurahan lainnya berjarak 5-10 km.

### **2. Luas Wilayah**

Pada tahun 2019 kelurahan Parang Tambung mengalami pemekaran menjadi 2 kelurahan yakni Kelurahan Parang Tambung dan Kelurahan Bontoduri. Oleh sebab itu, Kecamatan Tamale pada Tahun 2016 terdiri dari 11 Kelurahan dengan luas wilayah 20,21 km<sup>2</sup>. dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa Kelurahan Barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km<sup>2</sup>, terluas kedua adalah Kelurahan Tanjung Merdeka dengan luas wilayah 3,37 km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah Kelurahan Bungaya yaitu 0,29 km<sup>2</sup>.

Tabel 4.1

**Luas dan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kelurahan Di  
Kecamatan Tamalate Tahun 2018-2019**

Desa/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Ketinggian dari Permukaan laut		
		<500	500-700	>700
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Barombong	7,34	√	-	-
Tanjung Merdeka	3,37	√	-	-
Maccini Sombala	2,04	√	-	-
Balang Baru	1,18	√	-	-
Jongaya	0,51	√	-	-
Bungaya	0,29	√	-	-
Pa'baeng-baeng	0,53	√	-	-
Mannuruki	1,54	√	-	-
Parang Tambung	1,38	√	-	-
Mangasa	2,03	√	-	-
Bontoduri	1,26	√	-	-
<b>2019</b>	<b>21,47</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kec. Tamalate 2018</b>	<b>21,47</b>	<b>11</b>		

Sumber: Kantor Camat Tamalate

### 3. Aparat Pemerintah

Kegiatan pemerintahan di Kecamatan Tamalate dilaksanakan oleh sebanyak kurang lebih 243 orang aparat/pegawai negeri, berasal dari berbagai dinas/istansi pemerintah, yang terdiri dari 95 orang laki-laki 149 orang perempuan

Tabel 4.2

**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Tamalate dirinci  
Menurut Instansi dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2019**

Desa/ Kelurahan	Jumlah Pegawai		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kantor Camat	71	24	95

Cabang Dinas PK	1	4	5
Dipenda	1	-	1
Kantor Urusan Agama	8	10	18
Puskesmas	12	105	117
Kantor Statistik Kecamatan (KSK)	1	-	1
UPT DISDALDUK & KB	1	6	7
<b>2019</b>	<b>95</b>	<b>149</b>	<b>243</b>
<b>Kec. Tamalate 2018</b>	<b>95</b>	<b>149</b>	<b>243</b>

Sumber : Kantor Camat Tamalate

#### 4. Jumlah Penduduk

Dalam kurun waktu tahun 2018-2019 jumlah penduduk kecamatan Tamalate mengalami peningkatan.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Tamalate Tahun 2018-2019**

Desa/ Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan per Km <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Barombong	7,34	2958	13765	1875,34
Tanjung Merdeka	3,37	2092	11836	3512,17
Maccini Sombala	2,04	4934	23420	11480,39
Balang Baru	1,18	3810	19764	16749,15
Jongaya	0,51	3756	16258	31878,43
Bungaya	0,29	2130	9280	32000,00
Pa'baeng-baeng	0,53	4828	21498	40562,26
Mannuruki	1,54	3444	12530	8136,36
Parang Tambung	1,38	9279	43964	31857,97

Mangasa	2,03	9975	33226	16367,49
Bontoduri	1,26	-	-	----
<b>2019</b>	<b>20,21</b>	<b>47.206</b>	<b>205.541</b>	<b>10.170</b>
<b>Kec.Tamalate 2018</b>	<b>20,21</b>	<b>46,628</b>	<b>201.908</b>	<b>9.990</b>

Sumber : BPS Kota Makassar

Tampak bahwa jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 205.541 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk sebanyak 3.799 jiwa atau sekitar 1,99% bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 yang berjumlah 201.908 jiwa.

Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 102.128 jiwa dan perempuan sekitar 103.413 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 99,18 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 99 orang penduduk laki-laki.

**Tabel 4.4**

**Banyaknya Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin dan Sex Rasio di Kecamatan Tamalate Tahun 2018-2019**

<b>Desa/ Kelurahan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Sex Rasio</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Barombong	6791	6974	13765	97
Tanjung Merdeka	5879	5957	11836	99
Maccini Sombala	12022	11398	23420	105
Balang Baru	9754	10010	19764	97
Jongaya	8117	8141	16258	100
Bungaya	4552	4728	9280	96



Pa'baeng-baeng	108881	10617	21498	102
Mannuruki	6436	6094	12530	106
Parang Tambung	22046	21918	43964	101
Mangasa	15650	17576	33226	89
Bontoduri	-	-	-	----
<b>2019</b>	<b>102.128</b>	<b>103.413</b>	<b>205.541</b>	<b>99</b>
<b>Kec.Tamalate 2018</b>	<b>107180</b>	<b>107.732</b>	<b>198210</b>	<b>99</b>

Sumber : BPS Kota Makassar

Jika diperhatikan distribusi penduduk kecamatan Tamalate menurut Kelompok umur, tampak bahwa pada kelompok umur 20-24 tahun tercatat mempunyai populasi terbanyak umur 0-4 tahun.

## 5. Pendidikan

Pada tahun ajaran 2018/2019 jumlah Tk di Kecamatan Tamalate ada 27 Sekolah dengan 1.056 orang murid dan 161 orang guru. Pada tingkat SD, baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 44 sekolah dengan 13.594 orang murid dan 588 orang guru. Untuk tingkat SMP terdapat beberapa 14 sekolah sedangkan untuk tingkat SMA terdapat 11. Di kecamatan Tamalate terdapat beberapa kampus antara lain Universitas Indonesia Timur (UIT) yang terletak di kelurahan Balang Baru dan Universitas Negeri Makassar (UNM) yang terletak di kelurahan Parang Tambung, namun kantor pysatnya terletak di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini.

## 6. Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan 2019 di kecamatan Tamalate tercatat 2 rumah sakit umum dengan satu diantaranya tercatat sebagai rumah sakit umum khusus (kusta), 4 puskesmas, 22 pustu, 3poskedes, 3 rumah bersalin dan 109 posyandu. Selama tahun 2016 terdapat 48.496 pasien yang datang memeriksa kesehatan maupun berobat ke puskesmas yang berada di kecamatan Tamale. Namun diantara semua pasien tersebut terdapat pasien yang berasal dari luar kecamatan Tamalate dengan alasan puskesmas yang lebih dekat dengan kediaman pasien.

Gambar 4.2

Peta Lokasi Titik Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tamalate



Sumber: Kantor Kecamatan Tamalate

### C. *Program Kartu Sakti*

Kartu sakti merupakan salah satu program bantuan perlindungan sosial yang disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam program kartu sakti tersebut adalah kebijakan dari pemerintah. Oleh sebab itu Presiden Joko Widodo mengeluarkan program kartu bantuan yang di atur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga yang produktif. Pada program kartu sakti atau program bantuan terbagi tiga jenis yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar ( KIP), adapun penjelasan dari ketiga kartu tersebut yaitu:

#### 1. *Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)*

Kartu keluarga sejahtera (KKS) adalah bantuan bagi keluarga kurang mampu yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. Kartu Keluarga Sejahtera di tujukan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan serta menjaga stabilitas sistem. Pemerintah akan menyalurkan program kartu keluarga sejahtera tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu.

## 2. Kartu Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari program bantuan siswa kurang mampu. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

## 3. *Kartu Indonesia Sehat*

Program kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dirancang khusus untuk membantu masyarakat miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, sejak tahun 2014 disaat pemerintahan presiden Joko Widodo meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), dalam hal ini BPJS kesehatan adalah programnya. Sehingga Kartu Indonesia Sehat dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan. Dalam hal ini kebijakan pemerintah mengadakan programKartu IndonesiaSehat ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu agar kebutuhan kesehatan mereka dapat terpenuhi.

#### ***D. Implementasi Kebijakan Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar***

Fokus dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan kartu sakti di Kecamatan Tamalate kota Makassar. Implementasi ialah penerapan dari kebijakan public yang merupakan upaya mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Tahapan kebijakan public, implementasi kebijakan public merupakan tahapan yang penting dan harus dilalui demi mencapai hasil dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan public merupakan pelaksanaan atau eksekusi dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan sehingga tujuan dari kebijakan public itu akan tercapai apabila dilalui dengan tahapan pelaksanaan atau implementasi. Pada tahap ini implementasi tentunya akan ditemukan variable-variabel yang terkait keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan yang pada implementasi kebijakan lainnya akan sangat membantu perbaikan dan penyempurnaan tahapan implementasi kebijakan dimasa yang akan datang.

Pada bab ini peneliti akan menggunakan teori yang disampaikan oleh Merille S. Grindle bahwa implemetasi kebijakan sebuah tindakan yang admisitrative yang bisa di teliti pada tahap program tertentu. Dan dalam sebuah proses implementasi ini, akan

dimulai apabila tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan program kegiatan telah telah tersusun dan dana pun telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.<sup>21</sup>

Proses penelitian, peneliti tersebut menemukan beberapa beberapa masalah mengenai implementasi kebijakan kartu sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, diantaranya adalah data penerima bantuan yang masih menggunakan data lama, sosialisasi Kebijakan kartu sakti yang belum efektif dan komplek dari masyarakat. Berikut ini penjelasan penulis.

Masalah pertama yang penulis temui, yakni: **Sosialisasi**, yang dapat dilihat dari proses penulis melakukan wawancara terhadap informan dengan menanyakan mengenai Sosialisasi. Yang dimana sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat. Dalam hal ini saat menjalankan program kebijakan perlu adanya sosialisasi yang akan dilakukan oleh para pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui tujuan dan sasaran dari program kebijakan tersebut. Dalam hal ini, sosialisasi sangat berperan penting dalam sebuah langkah utama saat pelaksanaan program kebijakan oleh sebab itu dari program kebijakan pemerintah seperti program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Suatu program kebijakan harus disosialisasikan agar memiliki tujuan atau dampak yang diinginkan sosialisasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan atau tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan

---

<sup>21</sup> Imronah "Implementasi kebijakan perspektif, model dan kriteria pengukurnya", *Jurnal*. Hal 66.

dimana didalam sosialisasi kebijakan actor, organisasi, prosedur, dan teknik akan dipakai secara bersama.

Adapun pendapat yang di sampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yakni dari bapak Burhanuddin, terkait soal Program KKS, beliau mengatakan bahwa;

*“Sebenarnya pasti ada sosialisasi terkait itu walaupun misalnya tinggal perintah dari pusat ada perintah atau beliau menyuratkan bahwa ada pembagian misalnya KKS sekian orang ada memang informasi-informasi terkait itu dan kita juga ingin dan data-data itu bahwa ini untuk penerima KKS karena memang hubungan komunikasilah dari pusat”*<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan sosial bahwasanya Sosialisasi akan diadakan jika ada perintah dari pusat yaitu dari Kementerian Sosial. Dimana pihak dari Dinas Sosial hanya menjalankan instruksi dari pusat.

Adapun dari pihak Kementerian Sosial yakni bapak Ilham yaitu pendamping PKH, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau sebelum dibagi kartu itu yaa.. pasti ada kalau dari kementerian sosial otomatis sosialisasi dulu kita kasih nama calon penerima nanti kita wawancarai dan validasi setelah itu nanti kalau misalnya datanya sudah selesai dengan apa yang kita butuh nanti kita kirim ke kementerian nanti bank BRI, Mandiri, dan BNI nanti yang memanggil penerima bantuan itu untuk ambil kartunya”*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Bapak Burhanuddin, Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, wawancara, Dinas Sosial, 19 Maret 2021.

<sup>23</sup> Bapak Ilham, Pendamping PKH, Wawancara, Kecamatan Tamalate, 10 Maret 2021.

Dari hasil wawancara diatas yakni dari babak Ilham sekaligus pendamping PKH bahwasanya dia akan turun sosialisasi sekaligus mewawancarai masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Dalam mensosialisasikan program dari kebijakan tersebut sangat penting sebagai langkah awal dalam memberikan pemahaman dan mengimplementasikan dari Program Kartu Keluarga Sejahtera kepada masyarakat.

Adapun hasil wawancara dari pihak Dinas Kesehatan tentang Program Kartu Indonesia Sehat yakni ibu Sri Warda S.Km. selaku Staf Kesehatan dan Jaminan Kesehatan beliau mengatakan bahwasanya:

*“bahwa kami ini di Dinas Kesehatan sebelum berlakunya program jaminan kesehatan nasional, kami melakukan sosialisasi bahwa program pemerintah dinas kesehatan kita rutin melakukan sosialisasi dengan bentuk kegiatan dulu kita kalau sosialisasinya lewat kader kami undang kesetiap kelurahan, kami adakan sosialisasi tapi sosialisasinya itu melalui kader karna kami piker bahwa kader adalah garda terdepan dengan masyarakat yang bisa gampang menyampaikan informasi. Dan kami pun masih tetap melakukan sosialisasi dengan kader dan tokoh masyarakat jadi kami melakukan itu tentang program JKN (jaminan kesehatan nasional) nah disitu kami mengundang narasumber dari BPJS dan Sosial terus sosial juga menyampaikan kebijakan jaminan kesehatan pada masyarakat miskin yang bagaimana kriteriannya yang bisa digolongkan kedalam penerima KIS gratis”.<sup>24</sup>*

Berdasarkan wawancara yang di lontarkan dari ibu Sri Warda S.Km, yaitu sebelum program ini muncul pihak Dinas Kesehatan masih tetap rutin melakukan sosialisasi walaupun hanya melalui kader yang dimana jika melalui ia gampang

---

<sup>24</sup> Ibu Sri Warda S.Km, Staf Kesehatan dan Jaminan Kesehatan, wawancara, Dinas Kesehatan, 26 Maret 2021.



berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan mensosialisasikan program ini kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada penerima KIS dengan tidak membedakan dengan pasien yang berobat secara umum dan memberikan konsultasi mengenai seputar hidup sehat.

Berbeda dengan Dinas Pendidikan yang dimana ia tidak melakukan sosialisasi terkait program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP), yakni bapak Kurniawan beliau mengemukakan bahwasanya:

*“Untuk sejauh ini belum pernah kita adakan sosialisasi karena mungkin tidak ada rekomendasi juga untuk melakukan sosialisasi disamping itu juga itu tidak ada dana yang tersedia untuk melakukan sosialisasi”.*<sup>25</sup>

Dari wawancara diatas bahwasanya alasan dari pihak Dinas Pendidikan belum pernah melakukan sosialisasi karena belum ada rekomendasi dari pusat dan juga tidak tersedianya dana. Ini juga salah satu masalah karena menyebabkan masyarakat yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar tersebut merasa bingung karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Sosialisasi tersebut adalah salah satu aspek yang cukup berperan dalam pengimplementasian suatu program kebijakan, dalam sosialisasi ini sangat berperan sebagai upaya untuk mengenalkan suatu kebijakan program kartu tersebut melalui sosialisasi kepada masyarakat yang kurang mampu maka program tersebut dapat berjalan secara baik dan tepat sasaran.

---

<sup>25</sup> Bapak Kurniawan, Pengelola Program Indonesia Pintar, Wawancara, Dinas Pendidikan, 22 Maret 2021.

Masalah kedua, **Implementasi/Penerepan** Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus bisa dan berhasil di implementasikan. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan tanpa implementasi kebijakan hanyalah dokumen yang tidak berarti dalam sosial kehidupan. Dalam sebuah kebijakan program bantuan perlu adanya penerepan atau implementasi maka peneliti pun mewawancarai bebrapa informan terkait bagaimana implementasi atau penerepan kebijakan kartu sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Menurut bapak Burhanuddin selaku Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, terkait penerepan kebijakan Kartu Keluarga Sejahtera tersebut, yaitu:

*“Dalam penerepan kebijakan Kartu Keluarga Sejahtera ini lumayan bagus karena dalam satu kartu ini memiliki dua bantuan yaitu Program Sembako dan juga PKH, nah Program Sembako itu nilainya perkepala rumah tangga itu Rp200.000/bulan tetapi bukan dalam bentuk uang hanya itu tadi istilahnya BNT (bantuan non tunai), Program PKH ini lebih primadona lagi karena bisa sampai 2.600.000 tergantung keluarganya berapa sekolah sebenarnya dia terima per 3 bulan karena memang cukup lumayan misalnya ada anak SD,SMP,SMA itu semua ditanggung hamil lagi di tanggung, orang cacatnya ditanggung, lansianya juga ditanggung kalau PKH itu terimanya tunai tidak seperti yang Program Sembako dalam suatu barang”.*<sup>26</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya dalam penerapan Kartu Keluarga Sejahtera tersebut lumayan bagus yang dimana dalam program Kartu Keluarga Sejahtera yaitu dalam satu kartu tersebut memiliki dua bantuan yaitu Program

---

<sup>26</sup> Bapak Burhanuddin, Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, wawancara, Dinas Sosial, 19 Maret 2021.

Sembako dan PKH yang dimana dalam program sembako tersebut memiliki jenis bantuan bahan pokok seperti beras, telur, dan ikan kaleng dan akan diterima dalam 1 bulan sekali. Sedangkan PKH tersebut dianggap bantuan yang sangat baik yang dimana dalam keluarga tersebut yang memiliki anak balita, anak sekolah, orang hamil, orang cacat, dan lansia semua akan di tanggung da bantuanya itu dalam bentuk uang tunai dan diterima 3 bulan sekali.

Dan peneliti juga wawancara kepada informan terkait Bagaimana Implementasi/Penerapan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Tamalate Kota Makassar kepada Bapak Kurniawan selaku Pengelola Pip di Dinas Pendidikan dan beliau pun mengemukakan bahwasanya:

*“Kalau untuk penerepan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Tamalate saya ingat agak bagus cuman ada beberapa mungkin sekitar sekian persen mungkin belum bisa mencairkan akibat kesalahan nomor rekening dan mungkin yang sudah mencairkan ada sekitar 85% untuk tahun 2020”.*<sup>27</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya dalam penerepan Kartu Indonesia Pintar agak bagus tetapi ada sekitar 15 % yang belum mencairkan dananya karna kesalahan nomor rekening. Dalam penerepan KIP ini perlu adanya percepatan perbaikan dari nomor rekening tersebut karena ini akan menunda pencairan dari beberapa peserta penerima Kartu Indonesia Pintar tersebut.

Sedangkan penliti juga mewawancarai Ibu Sri Warda S.Km. selaku Staf Kesehatan dan Jaminan Kesehatan, dan beliau pun mengatakan bahwa:

---

<sup>27</sup> Bapak Kurniawan, Pengelola Program Indonesia Pintar, Wawancara, Dinas Pendidikan, 22 Maret 2021.

*“Penerapan Kartu KIS di kecamatan Tamalate kita ambil secara general bahwa masyarakat miskin dimanapun itu baik di kecamatan mana pokoknya diseluruh koto Makassar selalu kita upayakan dan setiap tahun kita up date data, sosial juga berupaya memaksimalkan supaya masyarakat miskin terutama tercover dengan jaminan kesehatan dan Alhamdulillah sekarang kita masuk UHC ( Universal Health care ) target yang ditetapkan oleh negara bahwa seluruh Provinsi atau kabupaten harus UHC artinya dia sudah tercover dengan jaminan kesehatan ”.*<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara diatas dengan Ibu Sri Warda S.Km. bahwa penerapan kartu KIS di kecamatan Tamalate sudah masuk dalam kategori UHC (Universal health care). UHC yaitu sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan preventif, kuratif, rehabilitative, dan promotif bermutu dengan biaya terjangkau. Dan pihak dinas kesehatan pun berupaya untuk meng update data setiap tahun agar semua masyarakat miskin bisa masuk dalam Jaminan Kesehatan.

Menurut Ibu Dg. Ngitte selaku masyarakat kecamatan Tamalate yang tidak mendapatkan kartu bantuan dan beliau mengatakan bahwasanya:

*“Kebijakanya sebenarnya belum merata Cuma orang-orang yang biasa dipercayakan untuk mendata biasa tidak langsungki juga kemasyarakat sebagian besar maksudnya itu kalau mau melihat atau mau mengetahui warga-warga miskin atau yang harus dapat ini dan itu harus sebenarnya di serahkan kepada rt, rt yang mendata dia orang yang tokoh masyarakat utama supaya deal ki maksudnya rata karna sepengetahuan saya banyak orang mampu dapat sedangkan banyak orang yang dibawah tidak dapat sebenarnya pemerintah responya bagus Cuma biasa orang-orang yang bekerja itu biasa kurang efektif.*

---

<sup>28</sup> Ibu Sri Warda S.Km, Staf Kesehatan dan Jaminan Kesehatan, wawancara, Dinas Kesehatan, 26 Maret 2021.

*tetapi pemerintah sebenarnya sudah bagus memberikan kartu bantuan kepada warga masyarakat Cuma yah kerjanya mungkin kurang deal.”<sup>29</sup>*

Hal ini yang di sampaikan oleh Ibu Dg Ngitte yang tidak mendapatkan kartu bantuan dan dia juga seorang janda sejak tahun 2000 dan dia memiliki anak 5, Ibu dg. Ngitte pun bekerja sebagai buruh harian lepas. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dg Ngitte selaku masyarakat kecamatan Tamalate bahwasanya dalam kebijakan bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah cukup bagus tetapi pekerja dibawahnya dalam bekerja kurang efektif dalam mendata.

Masalah ketiga, **Tingkat Keberhasilan.** Dalam setiap penerapan dalam kebijakan program pasti akan memiliki tingkat keberhasilan dalam menjalankan program tersebut dan peneliti Wawancara kepada Informan terkait Bagaimana tingkat keberhasilan mengenai penerapan kebijakan kartu sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Menurut Bapak Kurniawan selaku Pengelola Program Indonesia Pintar, beliau mengatakan bahwasanya:

*“Dalam tingkat keberhasilannya ini penerapannya Kartu Kip cukup meningkatki Cuma yang di akomodir semua kementerian itu memang ada beberapa syarat untuk mendapatkan kartu KIP diantaranya harus ikut PKH (program keluarga harapan) atau surat keterangan tidak mampu dari kantor lurah”.*<sup>30</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya dalam tingkat keberhasilan kartu KIP tersebut cukup meningkat hanya saja dari pihak kementerian tersebut memberikan

---

<sup>29</sup> Ibu Dg Ngitte, Harian Lepas, Wawancara, kecamatan Tamalate, 12 Maret 2021.

<sup>30</sup> Bapak Kurniawan, Pengelola Program Indonesia Pintar, Wawancara, Dinas Pendidikan, 22 Maret 2021.

syarat kepada siswa untuk mengurus surat keterangan tidak mampu dari kantor lurah dan harus mengikuti Program keluarga harapan

Dan peneliti pun mewawancarai Bapak Burhanuddin selaku Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, dan beliau pun mengemukakan bahwa:

*“Sebenarnya kalau berbicara tentang standar keberhasilannya ini penerapan program KKS saya kira cukup baik cukup lumayan kenapa saya katakan demikian karna inikan berlaku di seluruh Indonesia itu adalah salah satu teknik untuk pemberantasan kemiskinan itu tadi, artinya sudah berkurang maksudnya berkurang orang miskin yang ada di Indonesia, sudah berkurang berarti ada keberhasilan karna tujuan tadi bantuan-bantuan itu bagaimana mensejahterakan rakyatnya . jadi tingkat keberhasilannya itu cukup baik karena kita lihat semua orang membutuhkan itu siapa yang tidak mau membutuhkan bantuan gratis nah inilah kebijakan-kebijakan pemerintah yang memikirkan rakyatnya bagaimana mensejahterakan rakyatnya”<sup>.31</sup>*

Adapun dari hasil peneliatian diatas bahwasanya dalam tingkat keberhasilan terkait penerapan kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS tersebut cukup baik yang dimana pemerintah menerbitkan program KKS ini tersebut agar masyarakat miskin dapat keluar dari garis kemiskinan.

Sedangkan menurut Ibu Sri Warda S.Km. selaku Staf Kesehatan dan Jaminan Kesehatan, dan beliau pun mengatakan bahwa:

*“Tingkat keberhasilannya sudah tercapai 98% jadi dia sudah UHC belum 100% yah, artinya karena itu standarnya 95 % nah Makassar sudah tercapai 98% penduduk kota Makassar sudah tercover sudah memiliki kartu jaminan artinya*

---

<sup>31</sup> Bapak Burhanuddin, Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, wawancara, Dinas Sosial, 19 Maret 2021.

*kalau dia sudah memiliki kartu jaminan dia sudah tercover dengan jaminan kesehatan JKM, nah itu target pemerintah itu semacam sasaranya pemerintah jadi masih ada sekitar 2 % yang belum itu yang kita cari sekanrang”.*<sup>32</sup>

Sedang dari hasil wawancara diatas terkait tingkat keberhasilan mengenai penerepan program kebijakan Kartu Indonesia Pintar yang dimana penduduk Makassar tersebut sudah mencapai 98% dan sudah memiliki kartu jaminan kesehatan, hanya saja sisa 2% yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan tetapi pemerintah tersebut akan berusaha untuk mencapai 100%.

Masalah Keempat, **Pendataan.** Peneliti pun mewancarai Informan terkait Pendataan. Dalam suatu kebijakan ataupun keputusan pasti tidak akan terlepas dari sumber informasi sebagai bahan pertimbangan dari sumber informasi inipun biasanya berupa data, dalam hal ini sangat penting bagi data akurat karena akan meningkatkan ketepatan dalam mengambil keputusan. Setiap memperoleh data memerlukan suatu proses pendataan. Hal inilah dimana proses pendataan ini sangat penting dalam menghasilkan data yang akurat dan penerima kartu sakti di Kecamatan Tamalate tersebut.

Dari pendapat yang di sampaikan oleh bapak Ilham selaku Pendamping bantuan Pkh terkait pendataan, beliau mengemukakan bahwasanya:

*“Jadi semuanya itu berdasarkan by data ada namanya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosisal), DTKS itu adalah data acuan dari segala macam penerima bantuan baik itu KIS, KIP, Bansos, ataupun KKS, jadi kalau misalnya*

---

<sup>32</sup> Ibu Sri Warda S.Km, Staf Kesehatan dan Jaminan Kesehatan, wawancara, Dinas Kesehatan, 26 Maret 2021.



*dia terdata dalam DTKS itu secara otomatis nanti itu kedepan akan masuk semua bantuan-bantuan itu.*<sup>33</sup>

Sesuai dengan Teori Gunakan yaitu Merielee S Gridle bahwasanya proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan program kegiatan telah tersusun dan dana pun telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.<sup>34</sup>

Sedangkan dari pihak Dinas Sosial yaitu bapak Burhanuddin selaku Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mengemukakan bahwa:

*“sebenarnya itu KKS menandakan bahwa orang tersebut sudah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di Kementerian bahwa inilah orang miskin di Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang terdata di kemensos tapi data itukan dari sini juga dikirim lewat sistem informasi kesejahteraan sosial maksudnya ini ada pendataan-pendataan yang dilakukan di kota Makassar lewat sistem informasi kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh musyawarah tentu misalnya itu di Kecamatan Tamalate ada musyawarah yang diadakan RT/RW setempat untuk menyampaikan bahwa inilah data-data orang miskin yang ada diwilayahnya namun dari dinas sosial ada pendamping TKSK yang dilibatkan diwilayahnya itu untuk mendata dan memberikan semacam formulir untuk mewawancarai orang tersebut maksudnya apakah betul memang miskin atau tidak dengan diberikan bukti-bukti tentu foto rumahnya jadi itu nanti dijadikan patokan terus dikirim ke kementerian sosial bahwa inilah data-data orang miskin”.*<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya dari pendataan Kartu Keluarga Sejahtera menandakan bahwa bagi masyarakat yang kurang mampu sudah terdaftar

---

<sup>33</sup> Bapak Ilham, Pendamping PKH, Wawancara, Kecamatan Tamalate, 10 Maret 2021.

<sup>34</sup> Imronah “Implementasi kebijakan perspektif, model dan kriteria pengukurnya”, *Jurnal*. Hal

<sup>35</sup> Bapak Burhanuddin, Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, wawancara, Dinas Sosial, 19 Maret 2021.



DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di kementerian sosial. Dan dari pihak Dinas Sosial pun melibatkan para TKSK untuk mendata para masyarakat yang kurang mampu dan juga mewawancarai.

Dan Bapak Burhanuddin tersebut menjawab soal tidak tepat sasaran kepada kartu bantuan tersebut beliau pun mengatakan bahwa:

*“Jadi kalau memang tidak tepat sasaran sekarang banyakmi yang punya mobil punya pekerjaan bagus , kemarin itu terjadi sedikit kesalahan teknis karena tidak ada laporan dari bawah yang kedua yang begitu semestinya pak lurah,, pak RT/RW menyampaikan hal itu bahwa sudah mapan itu warga kita bisa dicoret untuk mengganti lagi yang betul-betul miskin itu sebenarnya aturan yang sah, sekarang itu mungkin banyakmi kita dengar bahwa orang itu punya mobil, motor, sawah, kenapa masih menerima bantuan disini lain ada orang mapan belum menerima bantuan. Karena pada saat pendataan belumpi datang dia memang ada begitu dan juga biasa orang melapor bahwa pak RT/RW itu keluarganaji na kasih masuk itu pernah terlintas di berita itu. Sebenarnya itu kalau jujur RT/RW lurah sebagai ujung tombak terdepan diwilayahnya harus fair jangan yang membedakan itu sebenarnya tidk berlaku adil dimasyarakat”.*<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya dalam ketidaktepatan sasaran dapat dikatakan bahwa pendistribusian program kartu bantuan tidak merata atau tidak tepat sasaran karena masih ada keluarga yang dikategorikan mampu dan keluarga tersebut masih ada hubungan kerabat denfgan dengan perangkat desa, oleh sebab itu yang mendapatkan bantuan memang dikeategorikan betul-betul kurang mampu tidak mendapatkan kartu bntuan tersebut. Seharusnya pemerintah tersebut agar lebih teliti dalam mendata masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu agar pendistribusian

---

<sup>36</sup> Bapak Burhanuddin, Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, wawancara, Dinas Sosial, 19 Maret 2021.

kartu tersebut dapat tersalurkan secara adil tanpa mengecewakan masyarakat yang seharusnya membutuhkan bantuan tersebut.

Dan menurut Ibu Dg. Ngitte selaku masyarakat di kecamatan Tamalate yang tidak menerima kartu bantuan beliau hanya berpesan bahwasanya:

*“Mudah mudahan ini pemerintahan lebih baik lebih bijak terjun langsung kemasyarakat bilang Ini betul-betul bisa dapat kepada golongan menengah kebawah supaya mudah-mudahan ini negara semakin maju dan semoga juga pemimpinnya lebih jujur dan memamng memperhatikan warga miskin “.*

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya Ibu Dg.ngitte hanya berharap agar pihak pemerintah bisa bekerja lebih baik dan terjun langsung dalam mendata dan juga memperhatikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

Sedangkan menurut bapak Kurniawan selaku Pengelola Program Indonesia Pintar mennyatakan bahwa:

*“Kalau kita heran kenapa orang mampu dapat, jadi biasanya itu sekolah tidak mau repot jadi umpamanya 200 siswanya dia kirim semua karna dia fikir nanti disana dia filter ternyata kementrian tidak bisa filter semua se Indonesia jadi kementrian mungkin kewalahan juga jadi dia potong-potong saja karna kan setiap kabupaten/kota itu ada kuota namanya jadi kalau kita dimakassar ada kuota dikasih umpamanya itu 10 ribu siswa jadi 10 ribu saja yang dapat jadi harus sistem kuota disetiap daerah ndak bisaki lebih dari itu”.<sup>37</sup>*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pendistribusian yakni pemberian barang kebutuhan sehari-hari pada masa sulit atau darurat dari pemerintah untuk rakyat.<sup>38</sup> Dari pendapat KBBI dapat disimpulkan dalam pemberian bantuan

---

<sup>37</sup> Bapak Kurniawan, Pengelola Program Indonesia Pintar, Wawancara, Dinas Pendidikan, 22 Maret 2021.

<sup>38</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (diakses pada tanggal 24 september 2020), pukul 23:00

dari pemerintah yang seharusnya masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Dan peneliti juga mewawancarai mengenai Pendataan Kartu Indonesia Pintar yaitu Bapak Kurniawan Selaku Pengelola Program Indonesia Pintar beliau pun mengemukakan bahwasanya:

*“Jadi dia di usulkan melalaui DAPODIK Sekolah (data pokok pendidikan sekolah menurut dengan penghasilan orang tua jadi yang mendapat kartu KIP itu orang tua yang berpenghasilan 1 juta kebawah itu adalah salah satu sasaran kartu KIP dari sistem pengusulan itu dilihat dari data siswa operator sekolah yang mengusulkan lewat DAPODIK, Kementrian yang menyaring kembali dengan dengan itu tadi pendapatan orang tua yang 1 juta kebawah atau dia Program Keluarga Harapan ”.*<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara yang diatas mengenai pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bahwasanya para siswa di usulkan oleh DAPODIK Sekolah dengan melihat penghasilan orang tua dan juga ikut dalam Program Keluarga Harapan. Dan adapun kriteria yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar yaitu pendapatan orang tua 1 juta kebawah, mengikuti PKH, dan harus ada rekomendasi surat keterangan tidak mampu dari lurah.

Berikut jumlah penerima kartu keluarga sejahtera (KKS), kartu Indonesia sehat (KIS), dan kartu Indonesia pintar (KIP) menurut Kelurahan Kecamatan Tamalate kota Makassar.

---

<sup>39</sup> Bapak Kurniawan, Pengelola Program Indonesia Pintar, Wawancara, Dinas Pendidikan, 22 Maret 2021.

**Table 4.5**

**Jumlah penerima kartu keluarga sejahtera (KKS) menurut Kelurahan  
Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah Penerima (KKS)</b>
<b>Tamalate</b>	Balang baru	393
	Barombong	697
	Bongaya	71
	Jongaya	231
	Maccini Sombala	440
	Mangasa	318
	Mannuruki	54
	Pa'baeng-baeng	385
	Paratambung	747
	Tanjung Merdeka	347
<b>Total</b>		<b>3683</b>

Sumber : APBN

Berdasarkan table diatas bahwa jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tamalate sebanyak 3683 kartu, penerima terbanyak adalah Kelurahan Paratambung sebanyak 747 kartu dan penerima terendah yaitu Kelurahan Bongaya sebanyak 71 kartu.

**Table 4.6**

**Jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) menurut Kelurahan  
Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah Penerima (KKS)</b>
<b>Tamalate</b>	Balang baru	4223
	Barombong	5957
	Bongaya	1124
	Jongaya	2725
	Maccini Sombala	5052
	Mangasa	4531
	Mannuruki	753

	Pa'baeng-baeng	3799
	Paratambung	7021
	Tanjung Merdeka	2901
<b>Total</b>		<b>38086</b>

Sumber : APBN

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat di kecamatan Tamalate sebanyak 38086 kartu. Dan penerima terbanyak yaitu kelurahan Paratambung sebanyak 7021 kartu sedangkan penerima yang terendah yaitu kelurahan Pa'baeng-baeng sebanyak 753 kartu.

**Table 4.7**

**Jumlah penerima kartu Indonesia Pintar (KIP) menurut SD Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>JUMLAH SISWA YANG MENERIMA</b>
1	SD NEGERI BALANG BARU 1	5
2	SD NEGERI BAROMBONG	2
3	SD INPRES PABAENG-BAENG 1	7
4	SD NEGERI BALANG BARU	4
5	SD JAYA NEGARA	21
6	SD NEGERI BAYANG	5
7	SDIP AS SUNNAH	19
8	SD KARTIKA XX-2 ARMED MAKASSAR	2
9	SD NEGERI MANNURUKI	8
10	SD NEGERI SUMANNA	4
11	SD INPRES BALANG BODDONG	1
12	SD NEGERI BALANG BODDONG	9
13	SD MUHAMMDIYAH JONGAYA	8
14	SD NEGERI PARANG TAMBUNG 1	4
15	SD INPRES PA BAENG-BAENG	6
16	SD NEGERI MACCINI SOMBALA	6
17	SD SEKOLAH ALAM BOSOWA	2
18	SD BERBANTUAN BUNGAYA	2
19	SD. ULUMUL ISLAM BAKRI WAHID	12
20	SD BERBANTUAN KARYA II	8

21	SD NEGERI PARANGTAMBUNG 2	1
22	SD INPRES MALENGKERI BERTINGKAT	1
23	SD NEGERI KUMALA	1
24	SDIT KHALIFAH ISLAMIC SCHOOL OF INDONESIA	1
25	UPT SPF SD NEGERI MANNURUKI	7
26	UPT SPF SD NEGERI BAYANG	11
27	UPT SPF SD NEGERI SUMANNA	9
28	UPT SPF SD NEGERI BALANG BARU	6
29	UPT SPF SD NEGERI BALANG BARU 1	3
30	UPT SPF SD INPRES PA BAENG-BAENG	12
31	UPT SPF SD INPRES BONTOMANAI	6
32	UPT SPF SD INPRES MACCINI SOMBALA 1	9
33	UPT SPF SD INPRES MALLENGKERI 2	8
34	UPT SPF SD INPRES MALENGKERI BERTINGKAT	12
35	UPT SPF SD NEGERI BALANG BODDONG	3
36	UPT SPF SD INPRES GONTANG	8
37	UPT SPF SD INPRES BONTOA	12
38	UPT SPF SD NEGERI PARANG TAMBUNG 1	8
39	UPT SPF SD INPRES PABAENG-BAENG 1	13
40	UPT SPF SD INPRES JONGAYA	7
41	UPT SPF SD INPRES HARTACO INDAH	4
42	UPT SPF SD INPRES ANDI TONRO	9
43	UPT SPF SD INPRES MACCINI SOMBALA	12
44	UPT SF SD INPRES MALENGKERI 1	7
45	UPT SPF SD INPRES BAROMBONG 2	11
46	UPT SPF SD INPRES JONGAYA 1	1
47	UPT SPF SD NEGERI BAROMBONG	1
48	UPT SPF SD INPRES MACCINI BARU	1
<b>TOTAL</b>		<b>319 PENERIMA</b>

Sumber dari Dinas Pendidikan Kota Makassar

**Table 4.8**

**Jumlah penerima kartu Indonesia Pintar (KIP) menurut SMP  
Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>JUMLAH SISWA YANG PENERIMA</b>
1	SMP NEGERI 15 MAKASSAR	6
2	UPT SPF SMP NEGERI 18 MAKASSAR	18

3	SMP KARTIKA IX-1 MAKASSAR	7
4	UPT SPF SMP NEGERI 27 MAKASSAR	21
5	SMP NEGERI 24 MAKASSAR	17
6	SMP NEGERI 26 MAKASSAR	10
7	SMP NEGERI 55 MAKASSAR	9
8	SMP 99 MALENGKERI	1
9	SMP KHADIJAH	1
10	SMP YAPEND BUNGAYA MAKASSAR	1
11	SMP JAYA NEGARA	1
12	SMP NEGERI 54 MAKASSAR	1
13	SMP DIMENSI PEMBANGUNAN	1
14	SMP ULLUMUL ISLAM KH.BAKRI WAHID	1
15	SMP TAMAN SISWA	1
<b>TOTAL PENERIMA</b>		<b>96 PENERIMA</b>

Sumber dari Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Dalam sebuah program bantuan kartu sakti ini adalah salah satu sasaran atau target bagi masyarakat miskin yang dimana kemiskinan tersebut merupakan fenomena yang terjadi hampir diseluruh negara berkembang, kemiskinan ini muncul karena adanya ketidakmampuan beberapa masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Menurunnya kondisi ini menyebabkan kualitas sumber daya manusia sehingga pendapatan dan produktivitas yang diperoleh, Menurut bapak Burhanuddin mengatakan bahwasanya:

*“Tujuan kita ini bagaimana bisa mempercepat pemberantasan kemiskinan jadi saya sampaikan bahwa kalau orang miskin memang terbesar di kecamatan Tamalate ya.. kurang lebih dari 3,4 ribuan lah”.*<sup>40</sup>

Hal ini yang disampaikan oleh bapak Burhanuddin yakni orang miskin terbesar adalah kecamatan Tamalate dan pemerintah punbekerja keras untuk masyarakat

---

<sup>40</sup> Bapak Burhanuddin, Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, wawancara, Dinas Sosial, 19 Maret 2021.

dengan memiliki tujuan untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan di kecamatan Tamalate. Dalam hal ini kemiskinan yaitu permasalahan sosial yang paling rumit yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang mampu. Sesuai dengan Teori yang peneliti gunakan yaitu, Kemiskinan menurut Mudjarat Kuncoro kemiskinan yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimum dimana pada pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Dari konsumsi tersebut garis kemiskinan dibagi menjadi dua unsur yaitu: pertama, pengeluaran yang dibutuhkan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, kedua, jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi yang menggambarkan biaya keikutsertaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>41</sup>

Maka peneliti tersebut mewawancarai beberapa informan terkait apakah dengan adanya kartu sakti tersebut dapat menanggulangi kemiskinan di kecamatan Tamalate. Peneliti pun mewawancarai bapak Kurniawan selaku Pengelola Program Indonesia Pintar menurutnya:

*“Belum bisa menanggulangi kemiskinan karena nominalnya juga ndak terlalu ji karna kalau SD itu mereka Cuma dapat 450 per Tahun SMP nya itu 750 kalau SMA nya 1 jutaan ini pertahun baru cair”*<sup>42</sup>

Kemudian menurut pendapat Ibu Sri Warda S.Km selaku Staf Kesehatan dan Jaminan kesehatan mengenai penanggulangan kemiskinan yakni:

---

<sup>41</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia*, (Erlangga, 2016), h. 281.

<sup>42</sup> Bapak Kurniawan, Pengelola Program Indonesia Pintar, *Wawancara*, Dinas Pendidikan, 22 Maret 2021.



*“Keknya tidak terlalu memberi kontribusi besar untuk penanggulangan tapi dalam Pelayanan memang harus memiliki jaminan dalam hal pemberian pelayanan masyarakat miskin sangat-sangat mengena atau membantu”.*<sup>43</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam program kartu Indonesia pintar tersebut belum bisa menanggulangi kemiskinan karena kurangnya anggaran yang di berikan dan dalam pencairan pun hanya 1 tahun sekali di cairkan. Sedangkan dalam program Kartu Indonesia Sehat ini belum bisa memberi penanggulangan tetapi dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam menjalankan program ini sangat berguna bagi kesehatan masyarakat.

#### ***E. Dampak Kartu Sakti dalam Kemiskinan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar***

Dampak dari Program kebijakan pemerintah yaitu kartu sakti dalam kemiskinan memiliki dampak positif dan negative yakni:

##### **1. Dampak Positif**

Berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh bapak Kurniawan selaku Pengelola Program Indonesia Pintar menyatakan bahwasanya:

*“Kalau bagi siswa ya cukup bermanfaat karena dalam artian ini bisa untuk membeli perlengkapan sekolah”.*<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ibu Sri Warda S.Km, Staf Kesehatan dan Jaminan Kesehatan, wawancara, Dinas Kesehatan, 26 Maret 2021.

Sedangkan menurut ibu Nur Aeni salah satu penerima Kartu Indonesia Pintar dari program kartu ini mengatakan bahwa:

*“Menurutku saya sangat bermanfaat ki iyya karna dapatki kartu biaya sekolah”.*<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Nur Aeni terkait manfaat Kartu KIP peneliti pun mencoba membangun komunisasi kepada penerima kartu KIP. Dia memnjelaskan bahwa kartu KIP tersebut sangat bermanfaat karena sangat membantu, Bapak Kurniawan pun menjelaskan demikian,

Menurut Bapak Ilham selaku pendamping PKH terkait manfaat Kartu Keluarga tersebut mengatakan bahwasanya:

*“Dari pembagian kartu yang diberikan ini kepada masyarakat sudah banyak berdampak positif sudah ada yang keluar dari garis kemiskinan ada beberapa walaupun memeang beberapa persen yang keluar dari garis kemiskinan tetapi pada dasarnya itu sangat membantu pada masyarakat”.*<sup>46</sup>

Hal tersebut dikemukakan oleh bapak Ilham disebutkan memberi dampak besar bagi masyarakat. Dampak positifnya bukan hanya masyarakat tetapi juga terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan kemiskinan.

Sedangkan menurut informan Ibu Sri Warda S.Km. selaku Staf Kesehatan dan Jaminan Kesehatan, terkait manfaat kartu KIS dan beliau pun mengatakan bahwa:

---

<sup>44</sup> Bapak Kurniawan, Pengelola Program Indonesia Pintar, *Wawancara*, Dinas Pendidikan, 22 Maret 2021.

<sup>45</sup> Ibu NurAeni, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Kecamatan Tamalate, 13 Maret 2021.

<sup>46</sup> Bapak Ilham, Pendamping PKH, *Wawancara*, Kecamatan Tamalate, 10 Maret 2021.

*“Yang kita lihat sangat-sangat terbukti bahwa orang-orang pada datang mencari kalau mereka tidak punya kemampuan mereka berusaha bagaimana bisa pemerintah tanggung mereka karena kondisinya mereka itu kelihatan bahwa memang manfaatnya sangat besar karena kita berkecimpung di kesehatan disini sangat-sangat membantu minimal mereka memiliki jaminan bahwa kesehatannya kalau ada apa-apa dengan masalah kesehatan mereka sudah dijamin oleh negara tida lagi memikirkan biayanya”.*<sup>47</sup>

Dalam wawancara tersebut dengan informan bahwasanya dari program kartu KIS ini sangat-sangat membantu karena mereka yang merupakan masyarakat yang kurang mampu dengan kondisi ekonominya yang sangat lemah, dapat memperoleh bantuan dan pelayanan kesehatan gratis. Dalam suatu kebijakan yang dibuat pemerintah baik itu program peraturan atau perundang-undangan sebagai landasan hukum yang dimana dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil penerapan atau pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik serta bermanfaat.

Dari isi kebijakan pada teori Merilee S Grindle bahwasanya berupaya untuk menjelaskan atau menunjukkan dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasiaam kebijakan yang hendak dilaksanakan. Dalam sebuah kebijakan yang jelas, dan memberikan manfaat yang actual bukan hanya formal,simbolis,dan ritual semata kepada masyarakat dan mudah di implementasikan dibandingkan

---

<sup>47</sup> Ibu Sri Warda S.Km, Staf Kesehatan dan Jaminan Kesehatan, wawancara, Dinas Kesehatan, 26 Maret 2021.

dengan kebijakan yang kurang bermanfaat. Maka peneliti mewawancarai kepada informan-informan terkait manfaat kartu sakti tersebut.

## 2. Dampak Negatif

Bapak Ilham mengatakan dalam wawancara tentang dampak program kartu bantuan di masyarakat miskin yaitu:

*“Saya sudah berapa tahun ini menjadi pelaksana di Kementrian Sosial sampai sekarang ini belum ada pembaharuan data jadi memang itu murni data lama yang kita olah terus nah itukan data seharusnya diperbaharui terus harus ada musyawarah diantara RT/RW atau apakah yang mengusulkan data-data baru untuk penerima bantuan tapi saat ini mungkin tidak adaji pemerintah daerah dalam hal ini untuk memberikan data baru ”.*

Hal tersebut menjelaskan bahwasanya data yang digunakan adalah data lama seharusnya data tersebut harus di up date, dan inilah salah satu penyebab kenapa tidak tepat sasaran dalam penyaluran kartu bantuan tersebut, yang dimana pasti ada masyarakat sudah keluar dari garis kemiskinan. Dan jika sudah keluar dari garis kemiskinan bisa digantikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan program kartu bantuan tersebut, dan seharusnya kemiskinan ini sudah bisa dieliminir jika pendataannya sesuai sasaran. Dalam hal ini bahwasanya dalam pendistribusian kartu tersebut belum tepat sasaran karna data yang digunakan belum diperbaharui yang dimana masih meenggunakan data lama inilah salah satu ketidakadilan dalam pendistribusian kartu tersebut kepada masyarakat miskin.

Peneliti pun mewawancarai salah satu masyarakat kecamatan Tamalate yaitu ibu Ima beliau mengatakan bahwasanya :

*“Sebenarnya saya punya keluhan mengenai program kartu ini yang pertama itu sebenarnya banyak orang yang betul-betul membutuhkan kartu ini tidak dapatki yang kesua orang yang tidak wajar dapatki misalnya orang yang punya mobil,yang baikki pekerjaanya dapatki tapi yang tidak punya pekerjaan banyak anaknya tidak ada dapat biar satu”<sup>48</sup>*

Pernyataan dari ibu Ima bahwasanya, dalam pendistribusian program kartu ini menurut ibu ima masih belum tepat sasaran karna banyak masyarakat mampu tetapi mendapatkan program kartu, sedangkan masyarakat miskin yang mempunyai anak banyak dan tidak memiliki pekerjaan atau belum jelas tidak mendapatkan kartu bantuan.

Dari implementasi diatas adapun analisis kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pembagian kartu sakti dikecamatan Tamalate Kota Makassar. Yang dimana dalam penelitian ini menggunakan teori yang di kemukakan oleh Merielle S. Grindle bahwasanya implementasi kebijakan yaitu tindakan administrative yang bisa diteliti pada tahap program tertentu, yang dimana dalam sebuah proses implementasi tersebut, ini akan dimulai apabila tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan program kegiatan sudah tersusun dan dana pun sudah siap disalurkan untuk mencapai sasaran.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan kebijakan pun meliputi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang mengandung strategi penanggulangan kemiskinan melalui penciptaan peluang, komunitas pemberdayaan dengan

---

<sup>48</sup> Ibu Ima, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Kecamatan Tamalate, 12 Maret.

meningkatkan akses ke sumber daya ekonomi dan politik. Kemudian peraturan Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pasal 2: (1) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan pemerintah menentukan perlindungan sosial. Program tersebut berupa Program tabungan keluarga sejahtera, program Indonesia pintar dan program Indonesia sehat. Itu dilanjutkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Dalam polis ini terdapat 3 kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), kartu ini menandai bagi orang yang kurang mampu.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu bantuan non tunai yang melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat yang kurang mampu, Kartu Keluarga Sejahtera ini cukup membantu bagi keluarga miskin atau keluarga yang tidak mampu yaitu bisa membantu untuk menyambung hidupnya. Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS tersebut memiliki 2 bantuan seperti Program sembako dan Program Keluarga Harapan yang dimana dari dua bantuan Program bantuan sembako tersebut menerima bahan pokok seperti Beras 10 kilo, Telur 1 Rak, dan juga ikan sarden 10 kaleng sedangkan Program bantuan Keluarga Sejahtera atau PKH yakni jenis bantuannya adalah uang tunai dan jumlahnya pun masing-masing berbeda-beda jika dia mempunyai anak balita dia akan menerima Rp. 7.50.000, SD Rp 2.50.000, SMP, 3.35.000, SMA Rp. 500.000, dan juga Lansia. dan dia akan menerima per 3

bulan sekali, dan jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tamalate Kota Makassar mencapai 3683 penerima.

Adapun tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera tersebut :

- 1). Membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
- 2). Mencegah penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan akibat ekonomi
- 3). Mengurangi masalah kemiskinan danb meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
- 4). Membangun keluarga produktif dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 5). Dapat meningkatkan harkat martabat keluarga kurang mampu.

Dalam pendataan Kartu Keluarga Sejahtera di kecamatan Tamalate Kota Makassar tersebut masih menggunakan data lama yang dia olah terus yang dimana data tersebut harusnya diperbahurui per tahun. Inilah salah satu penyebab pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di kecamatan Tamalate tidak tepat sasaran, yang dimana jika pemerintah masih menggunakan data lama pastinya masyarakat sudah ada yang keluar dari garis kemiskinan, dan juga pasti ada masyarakat miskin pemula.

Pada dasarnya jika pemerintah melakukan pembaharuan data per tahun sekali program kebijakan pemerintah ini akan sangat efektif.

KIP merupakan singkatan dari Kartu Indonesia Pintar ini adalah salah satu program bantuan, dari pemerintah. Kartu Indonesia Pintar inipun dapat diberikan kepada siswa yang kurang mampu. Presiden Joko Widodo saat ini menciptakan Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini adalah salah satunya program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dasar dan menengah angka partisipasi sekolah, dan untuk meningkatkan keberlanjutan pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Program ini merupakan program peningkatan bantuan bagi siswa yang kurang mampu atau miskin.

Melalui program ini pemerintah berupaya melakukan pencegahan peserta didik yang berkemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik minat siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka. Program Indonesia Pintar ini juga diharapkan dapat meringankan biaya pendidikan peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dana KIP ini dapat digunakan untuk membantu pengeluaran siswa seperti pembelian perlengkapan sekolah, uang saku, biaya praktik tambahan dan biaya transportasi, dan adapun jumlah yang diterima bagi siswa SD, SMP, dan SMA yaitu jika siswa SD menerima RP. 4.50.000, SMP 7.50.000, dan SMA 1.000.000/tahun, dan kriteria yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar yaitu pendapatan orangtua 1 juta kebawah, mengikuti PKH, dan yang terakhir harus ada rekomendasi surat



bketerangan tidak mampu dari lurah. Sejak diluncurkannya Program Indonesia Pintar melalui KIP pada tahun 2014 program tersebut awalnya banyak kendala yang dihadapi terutama pada masalah pendataan dan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) , yang dimana tidak adanya sosialisasi di kecamatan Tamalate untuk siswa/ orang tua siswa. Dari pemerintah tersebut dalam penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dimana setiap kebijakan awalnya harus melakukan sosialisai agar siswa /orang tua siswa yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar(KIP) tersebut tidak merasa bingung.

Sedangkan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah salah satu program yang sangat dibutuhkan oleh para masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Dalam suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu peraturan, program. Atau perundang-undangan sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimpelementasinya. Setiap kebijakan adalah tentunya suatu upaya ataupun usaha dari pemnerintah untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta bermanfaat.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis. Tujuan dikeluarkanya Kartu KIS ini agar masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan secara Cuma-Cuma atau gratis. Dalam fungsi KIS ini disetiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan

tingkat lanjut, yang dimana peserta KIS adalah masyarakat yang tidak mampu dan penentuan pesertanya ditentukan oleh pemerintah serta iuranya ditanggung oleh pemerintah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari uraian diatas yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Pembagian Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada penulis selanjutnya.

#### **A. Kesimpulan**

Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Pembagian Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dalam mengurangi angka kemiskinan pemerintah membuat kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga sejahtera (KKS), Program Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat (KIS).

Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu yang diterbitkan pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu/miskin. Yang dimana Kartu Keluarga Sejahtera ini memiliki 2 program bantuan yaitu Program sembako dan program keluarga harapan, yang dimana program sembako tersebut setiap keluarga yang menerimanya akan menerima bahan pokok seperti beras, telur, dan ikan sarden sampai mencapai dana

sejumlah Rp. 200.0000 per keluarga per bulan sedangkan program keluarga harapan akan menerima uang tunai yang masing-masing berbeda-beda tergantung keluarga yang didalam. Dalam program Kartu Keluarga Sejahtera ini masih menggunakan data lama yang ia olah terus yang dimana inilah salah satu factor yang ketidak tepat sasaran dalam pembagian kartu sejahtera tersebut atau (KKS). Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini juga merupakan kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda siswa miskin, dalam pembagian Kartu Indonesia Pintar ini sangat bermanfaat bagi siswa yang membutuhkan karna ini sangat membantu dalam membeli perlengkapan sekolah. Pada tahap pertama dalam setiap kebijakan pastinya ada sosialisas yang dimana dalam sosialisasi tersebut sangat membantu agar para siswa/orang tua siswa tida merasa bingung dalam menggunakan Kartu Indonesia Pintar tersebut, yang dimana pada penerapan Kartu Indonesia Pintar ini di kecamatan Tamalate Kota Makassar masih belum pernah melakukan sosialisasi. Sedangkan Program Kartu Indonesia sehat merupakan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS). Kartu Indonesia Sehat ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan gratis. Setiap masyarakat apalagi masyarakat miskin pasti sangat-sangat bermanfaat untuk kesehatannya tanpa memikirkan biaya nya . kartu kis ini adalah kartu yang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin.

**B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah agar rajin memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa kebingungan dalam menggunakan kartu tersebut.
2. Diharapkan pemerintah dalam proses pendataan penerima kartu tersebut, hendaknya memperbaharui data tersebut tidak menggunakan data lama lagi supaya dalam pembagian kartu tersebut bisa tepat ditangan yang berhak mendapatkan program bantuan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

### Jurnal

Barlinti, Yeni Salma. "Kebijakn-kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan". *Jurnal Hukum*, 4, no. 3 (2007): h. 159.

Nurwati, Nunung. "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan". *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, 10, no. 1 (2008): h. 8.

### Buku

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Prenamedia Group, 2011.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Keban, Yermias T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media Yogyakarta, 2004.

Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publi*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Machmud, Amir. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, 2016.

Suparmoko. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*.

Yogyakarta: C.V Andi Ofset, 2002.

an-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh

Abdurrahman, *sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Hisbuttahrir Indonesia, 2004).

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: C.V Alfabeta,

2009.

Creswell, John W. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2012.

A.R, Syamsuddin & Damianti. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya, 2015.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan*

*Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grenmedia Widiasaena Indonesia, 2010.

## Internet

TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Sekretariat Wakil

Presiden RI.( diakses pada tanggal 09 Desember 2020 [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id)).

<https://makassarkota.go.id/geografis/> (Di akses pada tanggal 10 April 2021).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Wawancara dengan pendamping PKH yaitu Bapak Ilham**



**Wawancara dengan Bapak Kurniawan selaku pengelola Program Indonesia Pintar**





**Wawancara Ibu Sri Warda S.Km. selaku Staf Kesehatan dan Jaminan Kesehatan**



**Wawancara dengan bapak Burhanuddin selaku Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.**



**Wawancara dengan siswa yang sudah lulus tapi mendapatkan Kartu KIP**



**Wawancara dengan Ibu Ima yang menerima Kartu Kis dan Kip**



**Wawancara dengan Ibu selaku masyarakat kecamatan Tamalate yang tidak  
mendapatkan kartu bantuan**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurhalijah, lahir pada tanggal 29 Desember 1998 di Biringkaloro, Anak Kedua dari Empat bersaudara dari **pasangang** Abbas dan Syamsinah. Pendidikan formal di mulai di SD Inpres Biringkaloro dan tamat pada tahun 2011, kemudian pada tahun yang sama setelah lulus mendaftar di SMP Negeri 5 Pallangga selama 3 tahun hingga lulus pada tahun 2014. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pallangga dan tamat pada tahun 2017. Masuk perguruan tinggi pada tahun 2017 di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Ilmu Politik dan memperoleh gelar S.Sos di Uin Allauddin Makassar tahun 2021 dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Pembagian Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II : Jl. H. M. Yasin limpo No.36 Romang Polong-Gowa ☎ (0411) 841879 Fax 8221400

Nomor : B – 937/FUF/PP.00.9/2 /2021

Gowa, 18 Februari 2021

Lampiran : --

Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. : Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sulawesi Selatan  
di-

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat disampaikan, bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Nurhalijah  
N I M : 30600117014  
Tingkat/Smt. : Strata Satu (S.1) /VIII (Delapan)  
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Politik  
A l a m a t : Biring Kaloro

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul :  
"Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui  
Pembagian Kartu Sakti di Kecamatan Tamalate Kota Makassar"

sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1).

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M. Si  
2. Nur Utaminingsih, M. Si

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021.

Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Alauddin Makassar



Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211

Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313

Website : [www.dinsos.makassarkota.go.id](http://www.dinsos.makassarkota.go.id) Email : [dinsos@makasarkota.go.id](mailto:dinsos@makasarkota.go.id)

Makassar, 22 April 2021

Nomor : 460/507/Dinsos/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth. Dekan Fak. Ushuluddin, Filsafat  
dan Politik UIN Alauddin  
Makassar

di-

Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/452-II/BKBP/III/2021, Tanggal 17 Maret 2021, Perihal tersebut di atas maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : NURHALIJAH  
Nim/Jurusan : 30600117014/Illmu Politik  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UIN Alauddin  
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa  
Judul : *"ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI  
PEMBAGIAN KARTU SAKTI DI KECAMATAN  
TAMALATE KOTA MAKASSAR"*

Telah mengadakan **Penelitian** pada Instansi/ Wilayah Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Maret s/d 22 April 2021.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Penelitian  
DINAS SOSIAL



HATMA S. Sos

Pangkat Penata TK. I

NIP. 19680529 199102 2 002

**Tembusan :**

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul-sel di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul-Sel di Makassar
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111

Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 05 Maret 2021

**Kepada**

Nomor : 070 / 367 -II/BKBP/III/2021  
Sifat :  
Perihal : Izin Penelitian

**Yth. KECAMATAN TAMALATE**  
**KOTA MAKASSAR**

**Di –**  
**MAKASSAR**

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : **11747/S.01/PTSP/2021**, Tanggal 03 Maret 2021. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa

Nama : **NURHALIJAH**  
NIM / Jurusan : **30600117014/ ILMU POLITIK**  
Pekerjaan : **Mahasiswa (S1) UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Alamat : **Jl. SLT.ALAUDDIN NO.63 MAKASSAR**  
Judul : **"ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBAGIAN KARTU SAKTI DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak/Ibu, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **08 MARET t s/d 22 APRIL 2021**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada

Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

PIL KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KOTA MAKASSAR

**Drs. AKHMAD NAMSUM, MM**

Pangkat : Pembina

NIP. 19670524 200604 1 004

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 17 Maret 2021

**K e p a d a**

Nomor : 070 / 452 -II/BKBP/III/2021  
Sifat :  
Perihal : Izin Penelitian

**Yth.1.KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MAKASSAR  
2.KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR  
3.KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA MAKASSAR**

**Di –**

**MAKASSAR**

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : **11747/S.01/PTSP/2021**, Tanggal 03 Maret 2021. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : **NURHALIJAH**  
NIM / Jurusan : **30600117014 / Ilmu Politik**  
Pekerjaan : **Mahasiswa (S1) UIN Alauddin**  
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Samata gowa**  
Judul : **"ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBAGIAN  
KARTU SAKTI DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR "**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak/Ibu, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **17 Maret s/d 22 April 2021**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**PI KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KOTA MAKASSAR**  
  
**Drs. AKHMAD NAMSUM, MM**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19670524 200604 1 004

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip





# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Anggrek No. 2 Kel. Paropo Kec. Panakkukang  
Kota Makassar 90231, Sulawesi Selatan

Website : <https://disdik.makassar.go.id> : email : [disdikkotamaks@gmail.com](mailto:disdikkotamaks@gmail.com)



## IZIN PENELITIAN

NOMOR :070/0047/DP/III/2021

Dasar : Surat Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar  
Nomor : 070/452-II/BPKB/III/2021 Tanggal 17 Maret 2021  
Maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar :

## MENGIZINKAN

Kepada

Nama : NURHALIJAH  
NIM / Jurusan : 30600117014 / Ilmu Politik  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo No.36, Samata Gowa

Untuk

: Mengadakan *Penelitian di Dinas Pendidikan Kota Makassar* dalam  
rangka *Penyusunan Skripsi* pada *UIN Alauddin Makassar di Makassar*  
dengan judul penelitian:

“ ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBAGIAN  
KARTU SAKTI DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR ”

Demikian izin penelitian ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 18 Maret 2021

An. Plt. KEPALA DINAS

Sekretaris

ub

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



**A. SITI DJUMHARIJAH, SE**

Rangkat : Penata Tk.I

N I P : 19700109 199403 2 004



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710  
**MAKASSAR**

Nomor : 440/157/PSDK/III/2021  
Lamp :  
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,  
Kepala Puskesmas Tamalate  
Di  
Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik,  
No : 11747/S.01/PTSP/2021, 03 Maret 2021, maka bersama ini di sampaikan kepada  
saudara bahwa :

Nama : Nurhalijah  
NIM : 30600117014  
Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan  
Kemiskinan Melalui Pembagian Kartu Sakit di Kecamatan  
Tamalate Kota Makassar

Akan melaksanakan Penelitian di wilayah kerja puskesmas yang Bapak/Ibu  
pimpin

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar , 17 Maret 2021  
Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar



**dr. Andi Hadijah Iriani R, Sp.THT, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19610807 198803 2 005



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN TAMALATE  
KELURAHAN MANGASA  
Jl. Sultan Alauddin II No 134 Telp ( 0411 ) 868 184 Kode Pos  
90221. Makassar



Makassar, 10 Maret 2021

Nomor : 072 / 15 / KM / III / 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth : Bapak/Ibu ORT dan ORW  
Se-Kelurahan Mangasa  
Di,  
Tempat

Menindak lanjuti Surat dari Kecamatan Tamalate Nomor : 400 / 12/ KT / II / 2021, Tanggal 05 Maret 2021 perihal Izin Pengambilan Data, maka dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : **NURHALIJAH**  
Nik : 30600117014  
Instansi / Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.63, Makassar  
Pelaksanaan : 08 Maret 2021 s /d 22 April 2021  
Judul : **"ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI  
PEMBAGIAN KARTU SAKTI DI KECAMATAN  
TAMALATE KOTA MAKASSAR"**.

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Wilayah Saudara dan pada prinsipnya kami menyetujui, oleh sebab itu diharapkan kepada Bapak/Ibu ORW. se-Kelurahan Mangasa memberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Camat Tamalate Kota Makassar



**MUHAMMAD DARWIS SYAR.S.STP.**

Pangkat : Pembina IV/a

Nip: 19780715 199703 1 003